

SKRIPSI

**Akuntabilitas Pengelolaan Objek Wisata Hutan Bakau**

**Di Kabupaten Mamuju**



Oleh:

**RIZKI NURBANI ANTO**

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 0501 114

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2021**

SKRIPSI

**Akuntabilitas Pengelolaan Objek Wisata Hutan Bakau**

**Di Kabupaten Mamuju**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh  
Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.Sos)

Disusun dan Diajukan Oleh:

RIZKI NURBANI ANTO

Nomor Stambuk: 10561 0501 114

Kepada

23/03/2021

1 cc  
Sub. Alumni

P/0059/ADN/21 cc  
ANT  
a'

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

## HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Proposal Penelitian : Akuntabilitas Pengelolaan Objek Wisata Hutan

Bakau Di Kabupaten Mamuju

Nama Mahasiswa : Rizki Nurbani Anto

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 0501 114

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

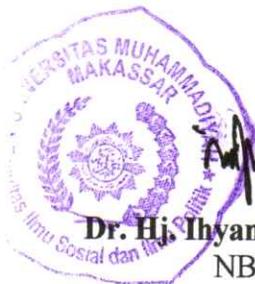
  
**Dr. Muhammad Tahir, M.Si.**

  
**Riskasari, S.Sos., M.AP**

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi



**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si**  
NBM:730727

  
**Nasrul Haq, S.Sos, MPA**  
NBM: 1067463

## HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0157/FSP/A.4-II/II/42/2021. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Rabu, 24 Februari 2021.

### TIM PENILAI

Ketua



**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si**  
NBM: 730727

Sekretaris



**Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si**  
NBM: 1084366

### PENGUJI:

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si



2. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si



3. Dr. Drs. H. Anwar Parawangi, M.Si



## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Rizki Nurbani Anto

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 0501 114

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benarskripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan pemberian sanksi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 24 Februari 2021

Yang Menyatakan,



Rizki Nurbani Anto

## ABSTRAK

**Rizki Nurbani Anto. Akuntabilitas Pengelolaan Objek Wisata Hutan Bakau Di Kabupaten Mamuju** (dibimbing Muhammad. Tahir oleh dan Riskasari).

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan sebuah komponen daerah yang ikut memberikan sumbangsih kepada masyarakat dan daerah melalui program-program yang dilakukan. Penelitian ini memfokuskan permasalahan pada akuntabilitas pemerintah pada pengelolaan Objek Wisata Hutan Bakau di Kabupaten Mamuju melalui *Akuntabilitas Manajerial, Akuntabilitas Program dan Akuntabilitas Finansial*. Dengan demikian, tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mengenai pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Objek Wisata Hutan Bakau Di Kabupaten Mamuju.

Metode Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa yang ada dalam suatu instansi pemerintahan yang terjadi dilapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data penelitian ini menggunakan tiga komponen yang terdiri reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) akuntabilitas manejerial belum berjalan secara maksimal dikarenakan minimya anggaran sehingga belum melakukan pembinaan kepada masyarakat (2) akuntabilitas program, pemerintah belum mampu menjalankan program pengelolaan pariwisata hutan bakau seperti penghijauan hutan bakau yang menjadi fokus program pengelolaan wisata hutan bakau dan belum maksimal dalam menjalankan sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut merawat hutan bakau (3) akuntabilitas finansial, anggaran untuk wisata hutan bakau ini masih sangat minim sehingga pengelolaan wisata hutan bakau belum maksimal atau belum terlaksana sepenuhnya. Semua indikator belum berjalan sesuai dengan SOP yang ada dan juga untuk akuntabilitas finansial yang belum transparan kepada masyarakat.

*Keyword:* Pelayanan surat izin usaha perdagangan, pelayanan terpadu satu pintu

## KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Akuntabilitas Pengelolaan Objek Wisata Hutan Bakau Di Kabupaten Mamuju*”.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Muhammad Tahir, M.Si. selaku Pembimbing I dan Ibu Riskasari, S.Sos., M.AP selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik. S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos, MPA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Para pihak Dinas yang ada pada lingkup pemerintah Kabupaten Mamuju yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
5. Kedua orang tua dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 24 Februari 2021



Rizki Nurbani Anto



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN ILMIAH</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Akuntabilitas .....	11
B. Kerangka Pikir .....	20
C. Fokus Penelitian .....	21
F. Deskripsi Fokus Penelitaian .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	24
B. Jenis Penelitian .....	24
C. Sumber Data .....	25
D. Informan Penelitian .....	25
E. Teknik Pengumpulan Data .....	27
F. Teknik Analisis Data .....	28
G. Keabsahan Data .....	29
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	32
B. Hasil Penelitian .....	42
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	79
<b>LAMPIRAN</b> .....	81

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hutan bakau atau mangrove mempunyai definisi sebagai hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau yang terletak digaris pantai dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut tepatnya di daerah pantai dan sekitar muara sungai, sehingga tumbuhan yang hidup di hutan mangrove bersifat unik. Karena merupakan gabungan dari ciri-ciri tumbuhan yang hidup di darat dan di laut. Hutan bakau adalah sejenis hutan yang tumbuh dan berkembang di kawasan pinggir pantai dan muara-muara sungai.

Pada dasarnya hutan bakau memiliki fungsi serta tujuan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Pohon-pohonnya mempunyai akar-akar tunjang untuk bernafas. Akarnya melengkung dan mencuat keatas sehingga tidak selamanya terendam air, lingkungan fisik tempat tumbuhnya hutan bakau meliputi daerah pasang surut sampai airnya asin dan tanahnya berlumpur.

Hutan bakau tersebar di sepanjang pantai Indonesia, terutama pada pantai yang datar seperti pantai timur Sumatera, pantai utara Pulau Jawa, pantai Selatan Kalimantan, dan pantai-pantai lainnya yang ditumbuhi bakau secara alami. Hutan bakau di Indonesia merupakan yang terluas di dunia, akan tetapi sekarang banyak hutan bakau yang telah musnah dan rusak akibat penebangan-penebangan, baik diambil kayunya untuk dijadikan arang maupun diubah menjadi tambak-tambak ikan.

Menurut direktur jendral pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung di Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Hilman Nugroho Perkiraan luas hutan bakau di dunia sekitar 18 juta hektare, 8,6 juta hektare diantaranya atau 47,8% berada di Indonesia. Sayang sekali dan 8,6 juta hektare yang ada di Indonesia, hanya tinggal sekitar 32% yang baik, sedangkan selebihnya 68% atau 5,9 juta hectare telah musnah dan rusak. Berdasarkan identifikasi dan penelitian dirjen rehabilitasi lahan, kerusakan hutan bakau yang terbesar terdapat di luar kawasan hutan yang mencapai 4,2 juta hektare (87,5%) sedangkan didalam kawasan hutan mencapai 1,7 juta hektare (44,73%).

Mamuju menyimpan potensi destinasi wisata, yaitu salah satunya wisata hutan bakau (mangrove). Hutan bakau ini terletak di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Di wisata hutan bakau tersebut, Anda bisa merasakan kesejukan di bawah rindangnya hutan bakau dan jalanan di hutan bakau tersebut masih terbuat dari bambu dan kayu yang disejajarkan di atas sanggahan potongan kayu bakau. Ini berfungsi sebagai pijakan pengunjung menikmati rerimbunan hutan bakau. Adapun fasilitas lainya yakni gazebo berkonsep rumah pohon. Sangat cocok untuk berkumpul bersama keluarga. Ada juga sarana berfoto kekinian yang sayang untuk dilewatkan seperti 'Ayunan Mantan' dan 'Sangkar Penantian'.

Guna menikmati keindahannya, biasanya dikenakan biaya Rp 5.000/orang. Biaya inilah yang nantinya digunakan untuk mengelola hutan mangrove tersebut, tempat tersebut adalah hasil swadaya dari masyarakat. Objek wisata tersebut masih tergolong baru ini juga menawarkan sensasi menikmati wisata kuliner.

Anda menyantap di pondok-pondok semi permanen beratapkan daun rumbia yang berbaris diantara pesisir laut dan rimbunnya hutan bakau.

Hutan bakau memang sangat bermanfaat untuk manusia dan semua makhluk hidup yang tinggal dalam habitatnya. Hingga saat ini masih banyak kerusakan alam yang sebenarnya disebabkan oleh tindakan manusia. Manusia hendaknya selalu menyadari bahwa alam menyediakan sumber daya yang tidak akan pernah habis dan manusia memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengembangkannya. Hutan mangrove adalah salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah rawa dan/atau padat. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan terutama untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh rusaknya habitat untuk hewan. Kerusakan ini tidak hanya berdampak untuk hewan tapi juga untuk manusia. Mangrove telah menjadi pelindung lingkungan yang sangat besar.

Secara umum, wisata mangrove Indonesia dikonsept sebagai edu mangrove. Edu Mangrove yang umumnya dikenalkan kepada masyarakat seperti apa saja fungsi mangrove, apa saja jenis mangrove tersebut, bagaimana proses penanaman mangrove dan berbagai macam pembelajaran terkait hutan mangrove. Sehingga konsep edu mangrove sebagai salah satu pilihan wisata anti *mainstream* benar-benar dapat diterima oleh masyarakat sebagai salah satu wisata yang menyegarkan mata. Di Indonesia, terdapat beberapa hutan mangrove yang sudah dijadikan tempat wisata. Bahkan masyarakat menerima wisata anti *mainstream* ini sebagai wisata yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga di saat *weekend*. Selain itu,

edu mangrove juga dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah sebagai salah satu mata pelajaran alam, yang mengadopsi konsep outdoor class. Baik dari tingkat PAUD, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah, bahkan hingga Perguruan Tinggi. Mangrove adalah jenis tanaman dikotil yang hidup di habitat air payau dan air laut. Mangrove merupakan tanaman hasil dari kegiatan budidaya atau diambil dari alam. Tanaman mangrove tidak dilindungi/dilarang untuk memanfaatkan bagian-bagian tanaman tersebut, misalnya dimanfaatkan untuk dijadikan bahan baku kosmetik/farmasi atau bahan tambahan tekstil.

Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, bahwa pemerintah daerah/kota diberikan wewenang dalam menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota, menetapkan destinasi (daerah tujuan wisata) pariwisata kabupaten/kota, menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota, melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata, mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya, memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya, memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru.

Pelaksanaan perencanaan strategis oleh Dinas belum maksimal, bertolak pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, menjelaskan bahwa: "Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah." Seharusnya pihak-

pihak yang disebutkan di atas memberikan perhatian yang lebih terhadap Pariwisata, baik itu dukungan fasilitas maupun layanan terhadap wisatawan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sangat jelas mengenai tugas pokok dan fungsi Dinas dalam mengatur strategi dan arah kebijakan, terlebih pelaksanaan dari rencana strategi tersebut. Dalam pelaksanaan perencanaan strategis yang dilalui oleh Dinas belum maksimal. Dalam rangka itulah, Rencana Strategis (Renstra) diperlukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki acuan, pedoman dan penuntun dalam mengembangkan kapasitas kelembagaan *Capacity Building*, bertekad dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengelolah dan mengembangkan seluruh potensi yang ada, mengembangkan akuntabilitas publik, mendorong partisipasi masyarakat merupakan sumber keuangan daerah dan sebagainya, yang amat diperlukan dalam optimalisasi penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah. Mengingat pariwisata selalu memberikan manfaat yang baik dalam pemenuhan kebutuhan, penyerapan tenaga kerja, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional serta pendapatan daerah, maka perlu perencanaan-perencanaan yang sifatnya strategis.

Penerapan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka sektor pariwisata secara penuh menjadi tanggungjawab dari masing-masing Kabupaten atau Kota. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Mamuju merupakan salah satu

daerah tujuan wisata nasional yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi, kemudian juga berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju. Penetapan ini tentunya tidak terlepas dari pertimbangan kekayaan potensi alam dan budaya sebagai daya tarik wisata di wilayah provinsi Sulawesi Barat baik oleh wisatawan nusantara, di Kabupaten Mamuju terdapat objek wisata yang beragam seperti wisata alam, wisata budaya maupun wisata sejarah. Keadaan ini ditunjang oleh beberapa faktor geografis seperti, keadaan topografi, iklim, flora, fauna, dan kekayaan alam serta keadaan sosial budayanya.

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga, bahwa dalam rangka mendorong dan mengembangkan tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Mamuju dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah guna meningkatkan pendayagunaan Tempat rekreasi dan Olah Raga sebagai salah satu Aset Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting berguna untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah. Dinas daerah dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dinas daerah yang selama ini menangani pelaksanaan tugas-tugas memiliki fungsi yang sangat penting dalam pemerintah daerah. Daerah mempunyai peranan besar dalam pengembangan

potensi pariwisatanya, dinas pariwisata Kabupaten Mamuju sebagai organisasi yang terdekat dengan daerah dalam pembangunan kepariwisataan merupakan ujung tombak penentu keberhasilan kepariwisataan daerah.

Komponen lain yang perlu dicermati dalam proses pembangunan daerah adalah pemanfaatan lahan pemerintah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di bidang pariwisata yang memiliki nilai strategis. Sektor pariwisata merupakan kegiatan perekonomian yang berpotensi dan merupakan prioritas pengembangan bagi sejumlah negara, terlebih bagi negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki potensi wilayah yang luas dengan daya tarik wisata yang cukup besar, banyaknya keindahan alam, aneka warisan sejarah budaya, dan kehidupan masyarakat (etnik).

Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu penunjang perekonomian yang memiliki prospek yang cerah, tetapi hingga dewasa ini belum memperlihatkan peranan yang sesuai dengan harapan dalam proses pembangunan di Indonesia. Sektor pariwisata di Indonesia saat ini telah memberikan sumbangan dalam meningkatkan devisa maupun lapangan kerja. Sektor pariwisata juga membawa dampak sosial, ekonomi, maupun dalam konteks pelestarian dan pengelolaan lingkungan, sumber daya alam, dan budaya yang semakin sarif dan bijaksana. Kegiatan pariwisata tersebut sangat berperan dalam proses pembangunan dan pengembangan wilayah-wilayah tertentu yang memiliki potensi wisata.

Hal inilah yang mendorong meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara datang ke daerah-daerah tujuan wisata di Indonesia, termasuk Kabupaten Mamuju

dengan karakteristik wisatawan yang berbeda-beda. Sehingga kita dihadapkan pada persoalan untuk menata produk-produk wisata sehingga banyak diminati wisatawan.

Di Indonesia banyak daerah yang potensi wisatanya sangat besar, salah satunya di Provinsi Sulawesi Barat khususnya Kabupaten Mamuju. Sebagai salah satu daerah tujuan wisata Kabupaten Mamuju di Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju memiliki potensi alam dan budaya yang cukup memadai untuk dikembangkan menjadi daya tarik bagi kunjungan wisatawan. Hal ini akan memungkinkan berkembangnya berbagai alternatif dan aktivitas pariwisata alam, yang diminati wisatawan nusantara maupun mancanegara, misalnya aktifitas ekowisata, geowisata, panorama alam, dan lainnya.

Aktivitas-aktivitas tersebut mayoritas berada di Mamuju, akan tetapi para wisatawan lebih banyak mengeluarkan biaya pada saat berada di pusat kota, baik untuk menginap maupun untuk berbelanja. Kabupaten Mamuju memiliki banyak kawasan wisata alam yang banyak diminati terutama oleh wisatawan yang berasal dari luar Kabupaten Mamuju, di Kabupaten Mamuju banyak sekali terdapat objek wisata yang bisa dikunjungi baik yang sudah dikelola dengan baik maupun yang belum dikelola dengan baik. Beragam jenis wisata yang dimiliki Kabupaten Mamuju antara lain objek wisata alam Pulau, hutan bakau, dan air terjun yang berada di Kabupaten Mamuju.

Salah satu program dinas kebudayaan dan pariwisata yakni pengembangan daerah tujuan wisata ternyata tidak efektif dan tidak mampu mengatasi masalah yang hingga kini belum dapat terselesaikan dengan baik. Ada banyak

permasalahan yang ditemui, dimana keberadaan dari objek wisata sebagian besar area wisata infrastruk terutama jalan belum memadai dan minimnya perhatian dari pemerintah daerah khususnya dinas pariwisata Kabupaten Mamuju, sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat apalagi wisatawan luar. Proses pembangunannya pun tidak memperhatikan aspirasi dari masyarakat, hal ini kemudian membuat masyarakat kurang memperdulikan, bahkan tidak mendukung. Disamping itu system pemasaran yang kurang luas atau bahkan tidak tepat sasaran, tidak hanya hal tersebut di atas yang jadi masalah, tetapi juga sumber daya manusia (SDM) yang mengelola kurang berkompeten dalam masalah pariwisata, maka penulis tertarik meneliti dengan judul : ***“Akuntabilitas Pengelolaan Objek Wisata Hutan Bakau Di Kabupaten Mamuju”***.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan objek wisata hutan bakau di Kabupaten Mamuju ?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dari pengelolaan objek wisata hutan bakau di Kabupaten Mamuju ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan objek wisata hutan bakau di Kabupaten Mamuju.

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dari pengelolaan objek wisata hutan bakau di Kabupaten Mamuju.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan dari pada penelitian yang akan saya laksanakan ini baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis adalah sebagai berikut :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan sebagai bahan wawasan dan masukan yang sangat penting bagi saya selaku penyusun penelitian ini dan masyarakat serta seluruh *stakeholder*, terutama dalam akuntabilitas pengelolaan objek wisata hutan bakau di Kabupaten Mamuju. Untuk daya tarik wisatawan yang ada di Kabupaten Mamuju dan daya tarik wisatawan dari luar daerah Kabupaten Mamuju.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat menjadi sebagai acuan dan bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait. Dalam meningkatkan akuntabilitas penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi seluruh *stakeholder* dalam mengembangkan objek wisata serta peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Objek Wisata Hutan Bakau di Kabupaten Mamuju.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Akuntabilitas

##### 1. Pengertian Akuntabilitas

Pengertian yang luas akuntabilitas pelayanan publik berarti pertanggungjawaban pegawai pemerintah terhadap publik yang menjadi konsumen pelayanannya. Hal ini terkait dengan pemikiran/konsep masyarakat yang demokratis, dimana amanat yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang/sekelompok untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, oleh seseorang/sekelompok orang tersebut harus mempertanggungjawabkannya kepada orang-orang yang memberikan kepercayaan. Transparansi/keterbukaan (Choirul Saleh, 2012).

Akuntabilitas sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban atas segala tindakan pemerintah, tidak hanya sebatas menyediakan laporan kinerja secara transparan namun perlu mempertimbangkan aspek nilai di dalam masyarakat seperti yang dikemukakan Wahyudi Kumorotomo (2013:4)

Akuntabilitas adalah hubungan mendasar antara menunjukkan kewajiban dan keberadaan tanggungjawab untuk mencapai hasil yang sebelumnya ada kesempatan dan harapan. Setiap dari dalam akuntabilitas untuk keseluruhan kegiatan termasuk di dalamnya keputusan tidak menerima kegiatan dalam lingkungan kerja (Omoregie Charles Osifo, 2014)

Anonymous (2015) akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good corporate governance* berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan

hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggungjawab mengelola organisasi. Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari *good corporate governance* yaitu:

1. *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan.
2. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Banyak para ahli system administrasi yang kemudian memberikan definisi berbeda mengenai akuntabilitas, sebagaimana menurut Mahmudi (2010) akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya,

melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberiman data (prinsipal).

Sedangkan menurut Djalil (2014) definisi akuntabilitas tidak hanya itu, Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi public pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen, dan lembaga yudikatif) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*), dan yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik/pemerintah.

Akuntabilitas adalah instrumen untuk menunjukkan apakah prinsip-prinsip pemerintah, hukum, keterbukaan, transparansi, keberpihakan, dan kesamaan hak dihadapan hukum telah dihargai atau tidak. untuk menjamin nilai-nilai efisien, efektifitas, reliabilitas, dan predektibilitas dari administrasi publik.

## **2. Dimensi Akuntabilitas**

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari lembaga-lembaga sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban. Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri dari beberapa dimensi. Menurut Ellwood (1993) dalam Putra (2013) terdapat empat dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi organisasi sektor publik, yaitu:

- a. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum. Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
- b. Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya mark up dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.
- c. Akuntabilitas Program, Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
- d. Akuntabilitas Kebijakan, Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas

kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

### 3. Model-Model Akuntabilitas

Carino (Rakhmat, 2007:23) mengemukakan terdapat 4 model akuntabilitas yang meliputi:

#### a. *Traditional accountability*

Akuntabilitas tradisional merupakan suatu tanggungjawab birokrat yang telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi tertentu sebagaimana yang dinyatakan pada tingkatan hirarki tanggungjawab legal. Standar yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas tradisional yakni legalitas dan peraturan yang dibuat oleh pihak eksternal kepada orang yang bertanggungjawab.

#### b. *Managerial accountability*

Memfokuskan pada masalah efisiensi penggunaan dana publik, tenaga kerja dan sumber-sumber daya lainnya. Akuntabilitas ini menghendaki pejabat publik harus bertanggungjawab dari pada hanya sekedar mematuhi. Selain itu orientasinya pada sisi masukan dan menganjurkan perlunya perhatian terus menerus untuk menghindari pemborosan dan pengeluaran yang tidak perlu dan mendorong penggunaan sumber daya publik yang tepat.

#### c. *Program accountability*

Menyangkut penciptaan hasil operasi pemerintah dan melibatkan public terutama masyarakat lokal. Untuk mencapai efektivitas program sejumlah

sarana harus disediakan antara lain berupa pengukuran kinerja secara komprehensif. Akuntabilitas program berkaitan dengan kepemilikan unit-unit dan birokrat yang melakukan aktivitas bersama untuk mencapai efektivitas program.

*d. Process accountability*

Menyangkut informasi mengenai tingkat pencapaian kesejahteraan sosial atas pelaksanaan kebijakan dan kegiatan-kegiatan organisasi.

**4. Jenis – Jenis Akuntabilitas**

Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam lingkungan dan suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Maka pentingnya akuntabilitas sebagai unsur utama *good governance* antara lain tercermin dari berbagai kategori akuntabilitas.

Kemudian menurut Mahmudi (2010), akuntabilitas dalam lembaga publik dibagi menjadi 5 (lima) bagian yaitu:

a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran merupakan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan aktivitas penegakan hukum dan norma kejujuran yang ditunjukkan dengan tidak melakukan berbagai penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki.

b. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pola kerja manajerial yang harus dilakukan dengan efektif dan efisien.

c. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program adalah pertanggungjawaban yang berkaitan dengan program yang akan dijalankan. Orang yang berwenang dalam program ini harus dapat menunjukkan apabila program yang akan dibangun bias berjalan dengan baik atau tidak dan apa saja upaya yang bias dilakukan agar program yang akan direncanakan bisa berjalan dengan optimal.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas ini merupakan akuntabilitas yang berhubungan dengan pertanggungjawaban lembaga publik terhadap berbagai kebijakan dan keputusan yang sudah diputuskan atau diambil. Dalam hal ini, orang yang berperan dalam lembaga publik harus dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang sudah ditetapkan baik itu dari tujuan, alasan pengambilan kebijakan, manfaat yang muncul, hingga berbagai hal negatif yang mungkin ditimbulkan dari kebijakan yang akan atau telah diambil.

e. Akuntabilitas Finansial

Jenis akuntabilitas ini berkaitan erat dengan pertanggungjawaban lembaga publik terhadap tiap uang yang disetorkan masyarakat kepada pemerintahan. Lembaga publik harus dapat menerangkan bagaimana uang tersebut didapatkan, kemana uang tersebut dibelanjakan dan bagaimana pertanggungjawaban lainnya.

## 5. Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diukur melalui beberapa prinsip yang mendasarinya (Rakhmat 2009:57), yaitu:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah yang bersangkutan.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus obyektif dan transparan serta inovatif sebagai kata lisator perubahan manajemen instansi pemerintah.

Selain itu, Elwood (Raba: 2006) mengemukakan bahwa akuntabilitas dibedakan atas 4 (empat) jenis, yaitu:

- a. Akuntabilitas hukum dan peraturan, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin dijalankannya jenis akuntabilitas ini perlu dilakukan audit kepatuhan.
- b. Akuntabilitas proses, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan tugas apakah sudah cukup baik, jenis

akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pengelolaan objek wisata yang cepat, dan responsive.

- c. Akuntabilitas program, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan perimbangan apakah tujuan yang diterapkan dapat dicapai dengan baik, atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternative program yang dapat memberikan hasil optimal dengan fasilitas yang maksimal.

Akuntabilitas kebijakan, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai legislatif dan masyarakat luas. Ini artinya, perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.

Memperhatikan jenis-jenis akuntabilitas seperti dikemukakan diatas, maka pejabat publik didalam menjalankan tugas dan tanggungjawab disamping harus bertanggungjawab menurut umum atau peraturan, juga dalam proses pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, dalam program yang diimplementasikan, dan juga dalam kebijakan yang dibuat atau dirumuskan.

Jenis akuntabilitas yang telah dipaparkan, maka pengelolaan objek wisata hutan bakau di kabupaten mamuju termasuk dalam akuntabilitas proses menurut Elwood (Raba:2006), yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam menjalankan tugas apakah sudah cukup baik. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan fasilitas yang cepat, dan respositif.

Akuntabilitas tidak hanya memberi pernyataan finansial pada otoritas atau lembaga yang lebih tinggi, namun merupakan mekanisme pengungkapan

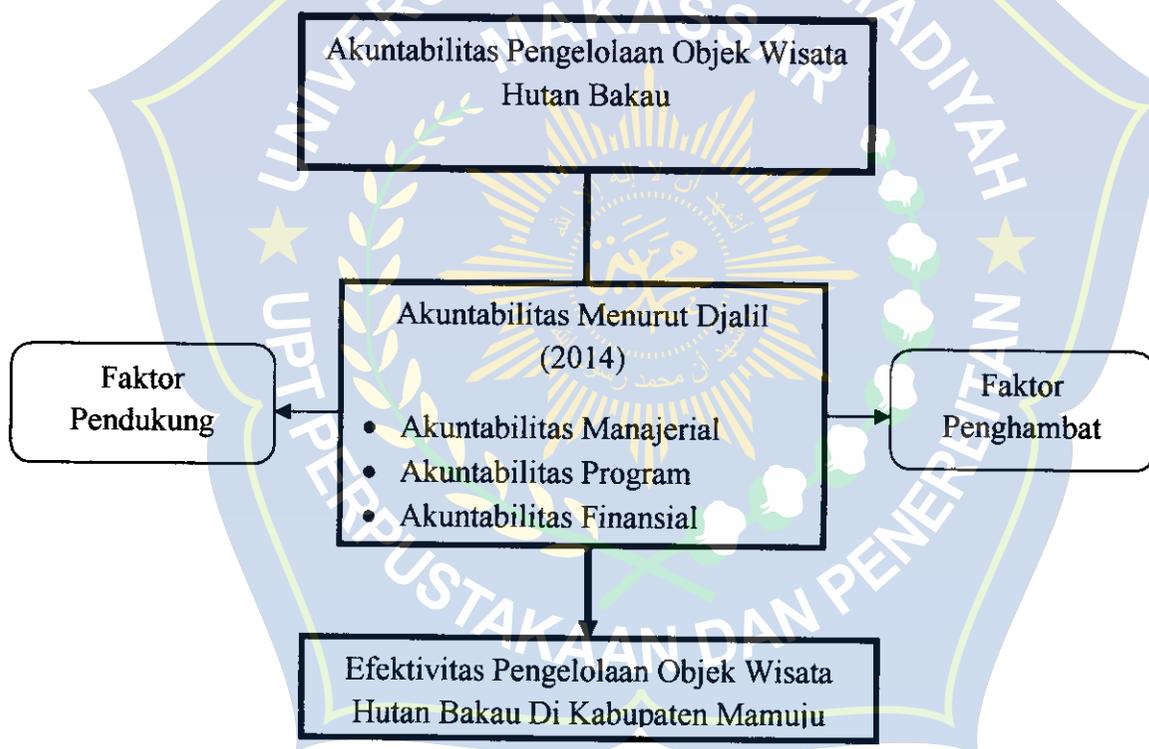
pandangan. Penggambaran fungsi dan kekuasaan menurut garis hirarki saja tidak akan mendukung akuntabilitas, maka horizontal tentang kekuasaan dan otoritas juga penting. Akuntabilitas merupakan proses dialog antara pejabat publik dan penerima layanan: maka pemahaman penerima layanan sangatlah penting, maka pejabat publik didalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya disamping harus berakuntabilitas menurut umum atau peraturan, juga dalam proses pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, dalam program yang diimplementasikan, dan juga dalam kebijakan yang dibuat atau dirumuskan.

#### **B. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir merupakan diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika bejalannya sebuah penelitian, dalam hal ini peneliti dalam melakukan penelitian mengangkat judul akuntabilitas pengelolaan objek wisata hutan bakau di Kabupaten Mamuju atas dasar pokok masalah pengelolaan yang masih belum efektif terbukti dengan adanya sistem karcis yang diberlakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju yang kemudian diberikan kepada setiap pengunjung tidak menjadi syarat pengembangan objek wisata hutan bakau tersebut, pasalnya fasilitas yang ada hanya fasilitas yang tidak memadai sementara pendapatan yang diperoleh semakin meningkat dan minimnya perhatian dari pemerintah daerah khususnya dinas pariwisata Kabupaten Mamuju. Hal ini kemudian peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan 3 (tiga) dimensi akuntabilitas sebagai indikator penelitian yaitu : (1) Akuntabilitas Manajerial, melihat sejauh mana pengelola dalam mengawasi perkembangan Objek Wisata Hutan Bakau tersebut. (2) Akuntabilitas Program, melihat sejauh mana pembuatan

program-program pemerintah maupun pengelola dalam mengembangkan Objek Wisata Hutan Bakau, dan (3) Akuntabilitas Finansial, melihat sejauh mana pemerintah maupun pengelola dalam mentransparansi penggunaan anggaran dalam pengembangan Objek Wisata Hutan Bakau tersebut. Dari ke tiga dimensi akuntabilitas tersebut menjadi dasar peneliti dalam melihat efektifitas Pengelolaan Objek Wisata Huta Bakau Di Kabupaten Mamuju.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



### C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang maka perlu memperhatikan beberapa indikator yakni akuntabilitas manejerial, akuntabilitas program, dan akuntabilitas finansial yang bertujuan untuk

meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan objek wisata kabupaten Mamuju.

#### **D. Deskripsi Fokus Penelitaian**

##### **1. Akuntabilitas Pengelolaan Objek Wisata**

Adalah sebuah perwujudan kewajiban dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan ataupun kinerja pada pengelolaan objek wisata hutan bakau berupa perkembangan sarana dan prasarana yang ada di hutan bakau Kabupaten Mamuju.

##### **2. Akuntabilitas Manajerial**

Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju melakukan pengelolaan dan pengembangan pariwisata hutan bakau , dalam pelaksanaannya dinas pariwisata bekerja sama dengan masyarakat dalam pengelolaan (rehabilitasi) mangrove dengan tujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan nilai ekosistem mangrove, sehingga perlu dilestarikan.

##### **3. Akuntabilitas Program**

Dinas pariwisata melakukan program penghijauan bekerjasama dengan dinas lingkungan hidup dan masyarakat dalam upaya menjaga ekosistem hutan bakau

##### **4. Akuntabilitas Finansial**

Dinas pariwisata melakukan perencanaan anggaran tahun 2021-2022 yang dialokasikan untuk pengelolaan wisata hutan bakau dan

anggaran untuk melaksanakan program pendukung dalam pengembangan wisata hutan bakau.

5. Faktor Pendukung yaitu adanya dukungan dan kerjasama dengan beberapa pihak yang terlibat dalam proses pengembangan dan pengelolaan hutan bakau, adanya beberapa bantuan dari pihak-pihak yang ikut berpartisipasi dan mendukung proses pemeliharaan hutan bakau di Kabupaten Mamuju, dan pembangunan fasilitas yang ada merupakan sumbangan langsung dari Kementerian Perikanan dan Kelautan RI, seperti pembuatan dermaga atau jembatan penghubung dan bibit pohon bakau yang diserahkan kepada masyarakat.
6. Faktor penghambat dalam hal ini dana pengelolaan yang belum memadai dan terbatasnya kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam mengolah dan mengembangkan potensi hutan bakau.
7. Efektivitas Pengelolaan Objek Wisata  
Yakni adalah pencapaian serangkaian tujuan pengelolaan objek wisata hutan bakau, dan seberapa baik efektifitas pengelolaan objek wisata tersebut.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan yaitu setelah seminar proposal dimulai pada tanggal 14 Maret sampai dengan 14 Mei 2020 dan berlokasi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju, berdasarkan atas pertimbangan peneliti yang ingin mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan objek wisata hutan bakau di Kabupaten Mamuju serta alasan memilih pengelolaan objek wisata hutan bakau di Kabupaten Mamuju sebagai tempat penelitian karena masih banyak ditemui masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan objek wisata.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap informan serta data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Tujuan digunakannya penelitian kualitatif yaitu untuk memberikan gambaran mengenai strategi promosi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan kunjungan destinasi wisata di Kabupaten Mamuju.

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi, Sugiyono (2014).

### C. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek peneliti dapat memperoleh data-data yang diperlukan. Adapun sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan dalam penelitian ini di peroleh dari 2 sumber yaitu:

#### 1) Data primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh dari pengamatan langsung (observasi), dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang berpengaruh tentang bagaimana proses strategi promosi destinasi wisata yang ada di Kabupaten Mamuju. sumber data utama yang di gunakan untuk menjangkau berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus penelitian secara langsung.

#### 2) Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan objek yang dikaji. Data sekunder terutama diperoleh melalui buku-buku dokumen, arsip, dan bahan-bahan tertulis lainnya dalam hal ini peneliti bertindak sebagai tangan kedua. pada Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju.

#### D. Informan Penelitian

Teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive* yaitu penentuan informan tidak berdasarkan atas strata, kedudukan pedoman atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian ini. Sesuai dengan kebutuhan peneliti terkait dengan strategi promosi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan kunjungan destinasi wisata di Kabupaten Mamuju, maka Penulis memilih informan adalah orang-orang yang dianggap nantinya dapat memberikan informasi yang akurat dan terpercaya mengenai bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Objek Wisata Hutan Bakau di Kabupaten Mamuju, dengan kriteria yang dibutuhkan oleh peneliti sebagai berikut:

Nama Informan	Inisial	Jabatan
USDI, S.Sos	UI	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
ABDUL RASYID, SE	AB	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata
MUNAJIB	MB	Pengelola objek wisata hutan bakau
HAMDHAN MALIK, S.STP	HM	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK)
ALFI	AF	Masyarakat
FAJAR	FJR	Masyarakat
DIRWAN	DW	Masyarakat
DENI	DN	Masyarakat

- 1) Usdi, S.Sos selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju
- 2) Abdul Rasyid, SE selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata
- 3) Munajib selaku pengelola objek wisata hutan bakau yang menjadi pelaksana utama di Kabupaten Mamuju.

- 4) Hamdhan Malik, S.STP Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK)
- 5) Masyarakat terdiri dari beberapa orang dari masyarakat setempat.

Tujuan pemilihan informan dengan kriteria tersebut untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan objek penelitian dan juga akurat dan terpercaya.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Agar dapat memperoleh data yang akurat maka dalam penelitian ini akan di gunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

##### **1) Observasi**

Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Observasi dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti oleh peneliti, seperti pada saat proses wawancara berlangsung. Peneliti terlibat langsung dalam kegiatan mencari data yang diperlukan melalui pengamatan. Untuk penelitian ini tingkat peran serta peneliti yaitu mengamati kegiatan promosi dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan pengelola objek wisata yang ada di Kabupaten Mamuju. Pengamatan ini dilakukan selama pengumpulan data berlangsung dan pencatatan sistematis tentang gejala-gejala yang diamati di lapangan penelitian.

##### **2) Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan bertanya langsung dengan pihak terkait dalam mengumpulkan data dan informasi menggunakan wawancara terstruktur, dilakukan oleh dua pihak yaitu oleh peneliti dan informan. Ketiga informan

diwawancarai berdasarkan waktu yang telah ditentukan dengan cara bertatap muka langsung, memberikan matriks wawancara kepada informan dan memberikan pertanyaan langsung kepada informan mengenai informasi yang peneliti butuhkan untuk penelitian ini.

### 3) Dokumen

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan pemikiran. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang dapat menambah rincian secara spesifik yang akan membantu kelengkapan berkas yang peneliti butuhkan. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa *hard file*, *brousur*, *website*, buku-buku, majalah, dan foto yang didapat langsung pada saat penelitian berlangsung di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju.

### F. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yaitu jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam memilih mana data yang dibutuhkan atau tidak, setelah dikelompokkan data tersebut dipaparkan oleh penulis dalam bentuk teks agar lebih mudah dimengerti, setelah itu penulis mengambil kesimpulan dari data tersebut sehingga dapat menjawab pokok masalah penelitian.

Untuk menganalisis sberbagai fenomena di lapangan, Menurut Mc Drury dalam Moleong (2014), mengatakan bahwaan analisis data yang digunakan dalam penelitian dapat dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas dalam hal ini gambaran tentang akuntabilitas pengelolaan objek wisata hutan bakau Di Kabupaten Mamuju.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk menguraikan secara singkat tentang akuntabilitas pengelolaan objek wisata hutan bakau Di Kabupaten Mamuju.

3. Penarikan Kesimpulan (*conclusion Drawing and Verification*)

Langkah ketik ada laman alisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek dalam hal ini mengenai akuntabilitas pengelolaan objek wisata hutan bakau di Kabupaten Mamuju.

## G. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi, Sugiyono (2014), menjelaskan ada tiga macam triangulasi. Ketiga triangulasi tersebut yaitu sumber, pengumpulan data, dan waktu.

Penjelasan dari ketiga triangulasi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Triangulasi sumber

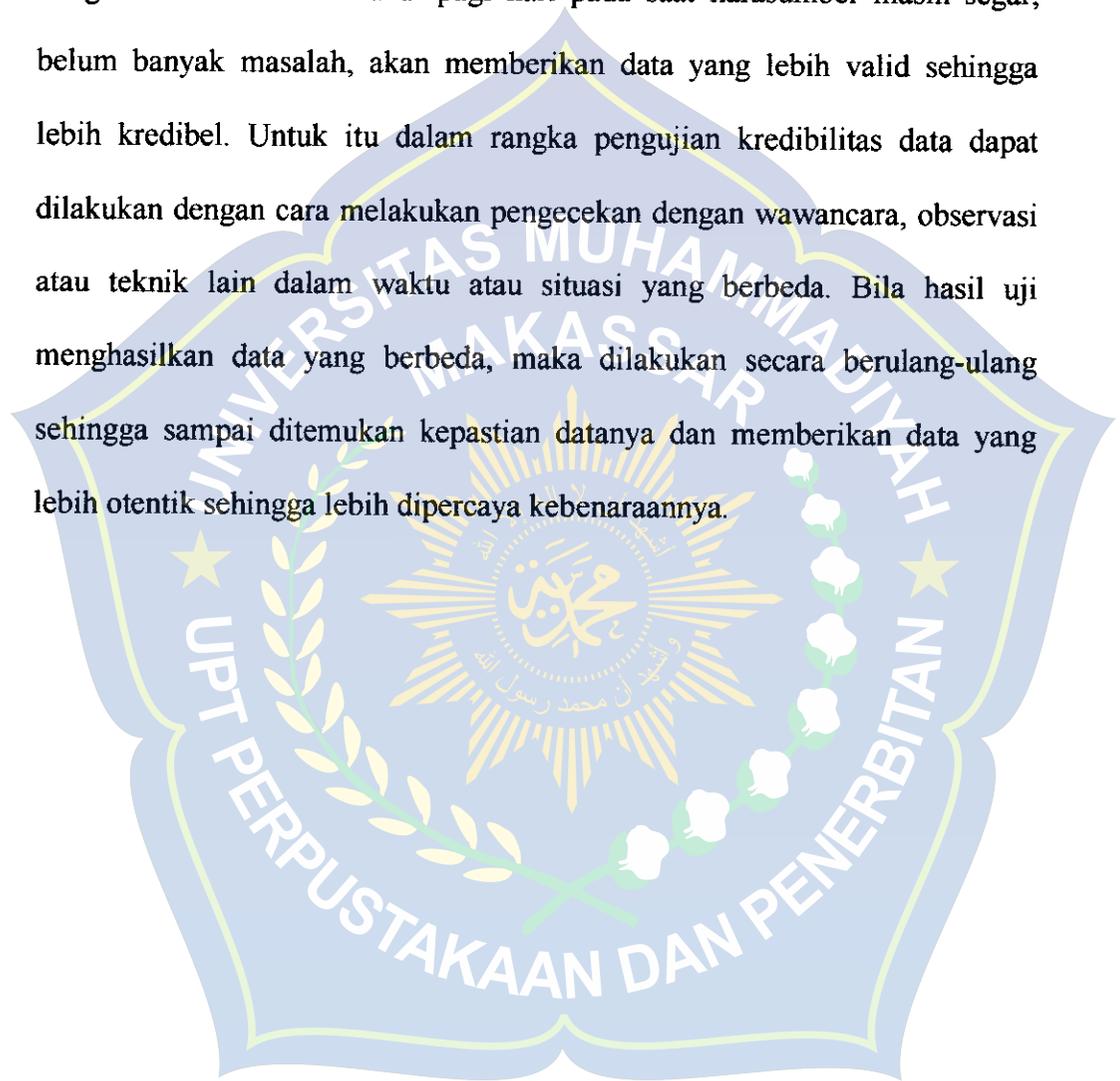
Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada di peroleh dari berbagai sumber untuk menilai kredibilitas data.

### 2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda. atau pengumpulan data merupakan suatu alat untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data dengan cara yang berbeda.

### 3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya dan memberikan data yang lebih otentik sehingga lebih dipercaya kebenarannya.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

Luas wilayah Kabupaten Mamuju adalah sekitar 5.056,19 km<sup>2</sup>, Daerah ini terdiri dari 11 kecamatan dengan 88 desa dan 11 kelurahan. Berdasarkan topografinya, daerah ini terdiri dari 56 desa atau 56,57 persen adalah daerah lereng/puncak, 5 desa atau sekitar 5,05 persen merupakan daerah lembah dan 38 desa (38,38 persen) adalah dataran. Kabupaten Mamuju yang merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Barat terletak pada posisi antara 10 38' 110" – 2 0 54' 552" Lintang Selatan dan 110 54' 47" – 130 5' 35 Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Tengah, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, dan Kabupaten Tana Toraja (Provinsi Sulawesi Selatan), sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara (Provinsi Sulawesi Selatan) dan sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Kondisi geografi Mamuju yang berupa deretan pegunungan menunjukkan jika aksesibilitas antara daerah yang satu dengan daerah lainnya akan dihubungkan oleh jalur darat. Penghubung jalur darat ini dikenal sebagai jalan. Pembukaan jalan dan peningkatan kualitas jalan mutlak diperlukan jika ingin meningkatkan kualitas perekonomian. Pada tahun 2017, panjang jalan darat yang ada di Kabupaten Mamuju sepanjang 1.291,60 KM. Panjang jalan ini sebagian besar merupakan jalan yang dikelola Pemerintah Kabupaten Mamuju yang sekitar 797,90 KM. Keseriusan Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam

meningkatkan kegiatan perekonomian aninin ampak dari peningkatan panjang jalan ini dari tahun sebelumnya yang sebesar 717,90 KM atau meningkat 80,00 KM. Meningkatnya panjang jalan ini langsung mau pun tidak langsung memiliki dampak terhadap capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju yang pada tahun 2017 mencapai 100 persen. Sedangkan tahun 2018 mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 100 persen.

### **1. Keadaan Wilayah Hutan Bakau**

Ekosistem mangrove berada di antara perairan tawar sampai perairan masin di Indonesia, jumlah spesies penyusun ekosistem mangrove terdiri tidak lebih dari 60 spesies. Komposisi spesies serta struktur spesies hutan mangrove bervariasi sesuai dengan kondisi habitatnya.

Di tepi laut tumbuh spesies yang memiliki akar tunjang yang kuat sehingga dapat menahan hempasan gelombang besar; semakin ke arah darat spesies yang tumbuh kelengkapan akar tunjangnya semakin kecil; akhir urutan ditempati oleh spesies yang tidak memerlukan akar tunjang karena berada di tempat yang sudah tidak gelombang. Tempat yang berair tenang merupakan tempat pemijahan biota laut, termasuk ikan, kepiting, kerang, dan lain-lain. Tenangnya air di pertengahan ekosistem mangrove menunjukkan bahwa "barisan spesies mangrove" memiliki kemampuan untuk meredam dan menjinakkan hempasan gelombang sehingga dengan ketebalan optimal terbukti juga mampu untuk mengurangi kecepatan arus yang mengikuti gelombang Tsunami. Sejak semula, sebagian pantai Sulawesi Barat telah diketahui

berpotensi untuk mendapat “serangan” tsunami sehingga keutuhan hutan mangrove perlu dijaga.

Di Provinsi Sulawesi Barat, ekosistem mangrove terdapat hampir di seluruh pantai untuk luas lahan wisata hutan bakau di saloleang itu sekitar 5 hektar, sehingga mangrove sangat berperan dalam menyiapkan protein hewani bagi masyarakat. Rusak, tercemar, apalagi hilangnya mangrove akan sangat berpengaruh penghasilan sebagian besar masyarakat karena turunnya produk perikanan akan menyengsarakan kehidupan nelayan. Jika produksi perikanan di Sulawesi Barat menurun berarti untuk mempertahankan kesehatannya masyarakat harus mengeluarkan dana lebih untuk pembelian protein yang pastilebih mahal dari pada harga ikan laut. Kawasan mangrove tergolong dalam ekosistem air masin atau payau yang umumnya terdapat di kawasan pantai baik di daerah beriklim basah maupun daerah beriklim kering musiman. Hutan mangrove selain secara alami tumbuh baik pada kawasan pantai yang berlumpur juga terdapat di muara-muara sungai besar dan dapat membentang sepanjang sungai sampai di pedalaman.

Oleh karena ekosistem mangrove dapat ditemukan juga pada kawasan lahan pamahasalkan kawasan tersebut berhabitat basah dan berair masin. Sebelum sampai di kawasan mangrove kadang-kadang terdapat vegetasirawa. Vegetasirawa menempati kawasan yang secara periodik mengalami banjir atau secara permanen tergenang oleh air hujan serta air yang mengalir balik dari sungai. Bergantung kepada terbentuk nyarawa, maka dikenal dengan rawa air tawar, rawa air masin dan rawa bergambut. Pada

masing-masing rawa memiliki komunitas tumbuhan yang berbeda dan membentuk ekosistem yang khusus. Vegetasi rawa terdapat pada kawasan lahan pamah, dataran pegunungan tinggi baik pada habitat yang beriklim basah maupun kering musiman

## **2. Keadaan Penduduk Sekitar Hutan Bakau**

Pada tahun 2018, jumlah penduduk di Kabupaten Mamuju sebanyak 286,389 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki dan perempuan masing-masing sebanyak 140.910 jiwa dan 145.479 jiwa. Kondisi ini menunjukkan perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan (sex ratio) Kabupaten Mamuju sebesar 103.24 yaitu untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk di Kabupaten Mamuju mengalami penambahan dari 2017 sebanyak 279.393 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terjadi peningkatan penduduk sebesar 100 persen dari tahun 2017. Komposisi penduduk Kabupaten Mamuju tahun 2017 terdiri dari 62.304 rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 5 orang, rata-rata anggota rumah tangga ini tetap dari kondisi 2017-2018 yang sebanyak 5 orang. Adapun jumlah rumah tangga tahun 2017-2018 masing-masing sebanyak 62.304 dan 63.903 rumah tangga. Apabila dirinci menurut kelompok umur, terlihat jika penduduk yang memiliki usia produktif mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2017, penduduk usia produktif di Kabupaten Mamuju sebesar 63,98 persen naik menjadi 64,26 persen di tahun 2018. Meningkatnya jumlah penduduk yang produktif menunjukkan jika terjadi penurunan angka beban tanggungan di Kabupaten Mamuju.

Masyarakat yang berada di sekitar ekowisata hutan mangrove adalah masyarakat desa Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju khususnya. Dusun yang berdekatan langsung dengan ekowisata mangrove yaitu dusun Saluleang, dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan pesat kegiatan dan pembangunan di pesisir bagi berbagai peruntukan (Pemukiman, perikanan, pelabuhan dll), tekanan ekologis terhadap ekosistem hutan mangrove, semakin meningkat pula, meningkatnya tekanan ini tentunya berdampak pada kerusakan ekosistem hutan mangrove itu sendiri secara langsung (misalnya kegiatan penebangan atau konversi) maupun tak langsung (misalnya pencemaran oleh limbah berbagai pembangunan). Menurut monografi desa Bebanga 2017, penduduk desa bebanga 8.402 Jiwa.

Hutan bakau kabupaten mamuju dilirik oleh Anggota Komisi IV Kasriyah saat kunjungan kerjanya pada tahun 2017, dengan luas lahan 75 hektare lagi tergolong masih produktif. Sedangkan yang dijadikan objek wisata hutan bakau dengan luas lahan hutan mangrove ini sekitar 30 hektare.

### **3. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju**

#### **1) Visi**

Mewujudkan pariwisata Kabupaten Mamuju yang maju dan ramah lingkungan. Maksud dari kandungan visi tersebut dapat dijelaskan, yaitu Pariwisata Kabupaten Mamuju yang maju adalah terjadinya perubahan pengelolaan sarana dan prasarana pariwisata sehingga dari tahun ketahun mengalami peningkatan jumlah kunjungan, peningkatan pendapatan asli daerah serta mengedepankan budaya bersih dalam pengelolaan objek wisata.

## 2) Misi

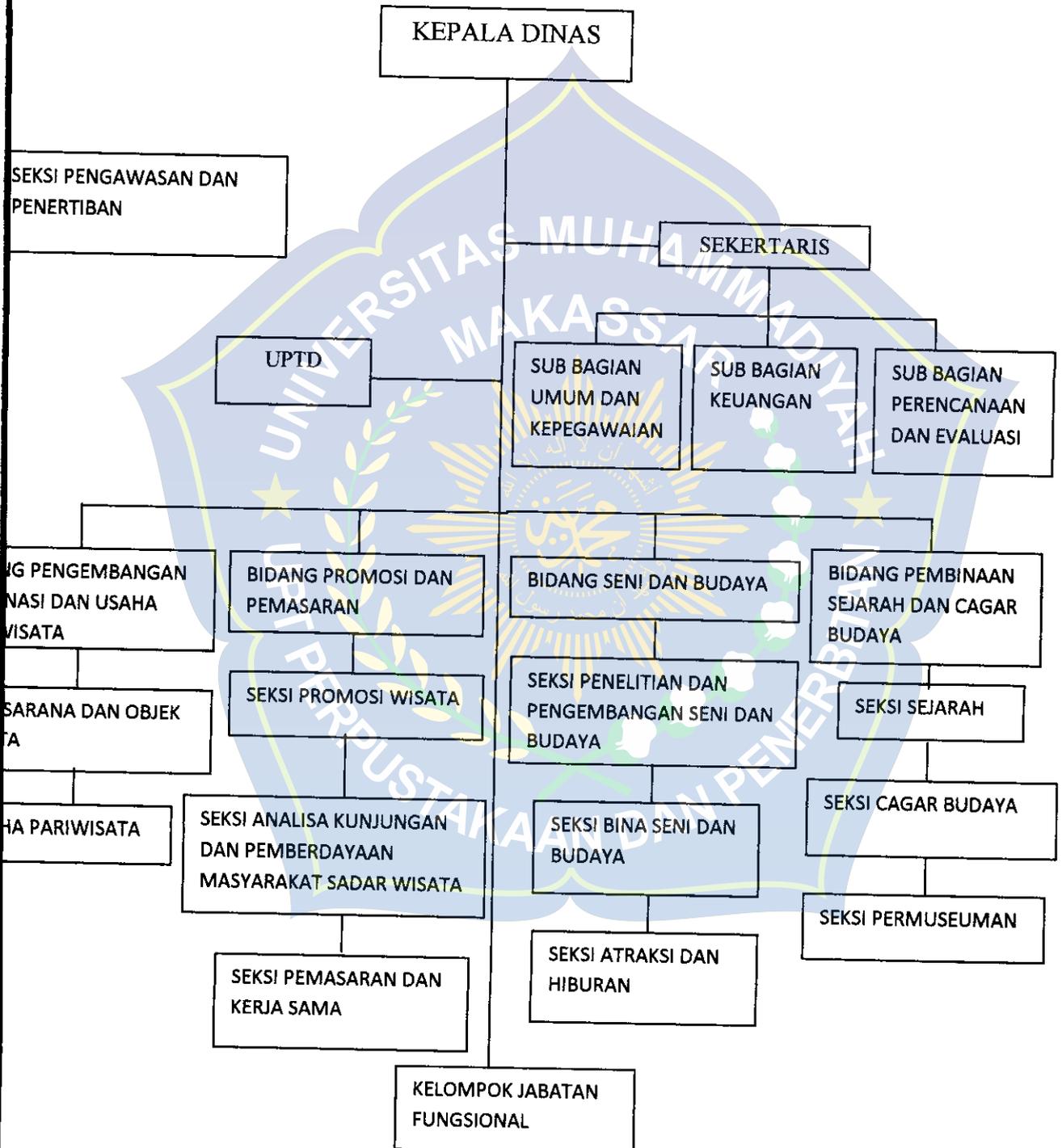
- a) Mengembangkan destinasi pariwisata melalui peningkatan sarana dan prasarana serta promosi pariwisata.
- b) Menggali dan mengembangkan kekayaan nilai budaya dan seni melalui riset, pagelaran, dan festival.
- c) Meningkatkan kapasitas SDM bagi pelaku usaha pariwisata dan mendorong terciptanya obyek wisata yang ramah lingkungan.

## 4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yakni merupakan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi, pada struktur organisasi ini menunjukkan pembagian kerja dan bagaimana fungsi serta kegiatan-kegiatan yang dikordinasikan. Selain itu juga struktur organisasi menunjukkan spesialisasi pekerjaan saluran pemerintah maupun penyampaian laporan, dari susunan dan hubungan pada komponen bagian posisi pada sebuah organisasi.

Struktur organisasi merupakan sebuah susunan hubungan antara setiap bagian maupun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, dan untuk mengetahui dengan jelas fungsi dan tugasnya pemerintah pada dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten mamuju menggambarkan komponen tugas pegawai sebagai berikut:

**Pemerintah Kabupaten Mamuju**  
**Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan**



## 5. Urian Tugas Unit Kerja

Ruang lingkup Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Mamuju di bagian operasional adalah sebagai berikut :

### a. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang kepemudaan, keolahragaan, kepariwisataan, dan kesenian. Untuk melaksanakan tugas pokok ini, Kepala dinas mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun rencana strategis dinas sesuai dengan rencana strategis kota.
- 2) Perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pemuda, olah raga, pariwisata, dan seni.
- 3) Perumusan bahan kebijakan dalam pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengawasan penyelenggaraan urusan kepemudaan, keolahragaan, kepariwisataan, dan kesenian.
- 4) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas.
- 5) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penggunaan anggaran dinas.
- 6) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

b. Sekertariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan dinas dan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan renstra dinas.
- 2) Penghimpunan dan pengelolaan data penyusunan renstra dinas.
- 3) Penyelenggaraan administrasi umum.
- 4) Penyusunan evaluasi dan laporan dinas.
- 5) Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah sekretariat
- 6) Penyelenggaraan urusan umum kepegawaian, rumah tangga dan asset dinas.
- 7) Pengelolaan keuangan dinas.
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan kepala dinas.

c. Kasubag Umum dan Kepegawaian, dan Kasubag Perencanaan

Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Kasubag Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas dan mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat.
- 2) Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan

permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan perencanaan evaluasi serta pelaporan.

- 3) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian.
  - 4) Pelaksanaan administrasi kepegawaian.
  - 5) Pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi.
  - 6) Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan rumah tangga yang lainnya.
  - 7) Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran dinas.
  - 8) Penyusunan rancangan produk hukum dinas.
  - 9) Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang di berikan oleh sekretaris.
- d. Kasubag Keuangan

Kasubag keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan dinas dan mempunyai fungsi :

- 1) Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan.
- 2) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan kegiatan sub bagian.
- 3) Penyiapan berkas-berkas keuangan dan penyiapan administrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan dinas.

- 4) Bagian Pengembangan Destinasi Dan Usaha Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengembangan Destinasi dan Usaha pariwisata yang mempunyai fungsi :
- a) Menyusun rencana dan program kerjatahunan
  - b) Mempersiapkan penyusunan rencana program pembinaan Destinasi dan Usaha
  - c) Memantau pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata
  - d) Mengelola dan memfasilitasi sosialisasi bidang destinasi wisata dan usaha pariwisata
  - e) Mengumpulkan dan mengelola data di bidang destinasi dan usaha pariwisata
  - f) Melaksanakan kegiatan pengembangan destinasi dan usaha pariwisata
  - g) Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi dalam rangka peningkatan pengembangan, produksi, dan ketrampilan
  - h) Menyusun laporan kegiatan seksi
  - i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- e. Kepala Seksi Promosi Dan Pemasaran Pariwisata.
- Kepala Seksi Pemuda mempunyai tugas menyelenggarakan segala urusan, pekerjaan dan kegiatan pendataan, pembinaan

organisasi/kelembagaan dan aktifitas promosi, dukungan kerjasama serta pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana aktifitas kepemudaan, menyelenggarakan seksi :

- 1) Pelaksanaan kegiatan Pendataan organisasi dan aktifitas promosi dan pemasaran di daerah.
- 2) Pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana dukungan kerjasama pemuda antar kabupaten/kota, antar provinsi dan antar negara.
- 3) Pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana kegiatan promosi dan pemasaran.

f. Bidang Pariwisata.

Kepala bidang pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pariwisata dan mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan bidang kepariwisataan dan kesenian.
- 2) Pelaksanaan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang kepariwisataan kegiatan bidang.
- 3) Pelaksanaan penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan.
- 4) Pelaksanaan pengelolaan kegiatan kepariwisataan.
- 5) Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi, pelaporan pajak hotel, restoran, dan pajak hiburan.

- 6) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## B. Hasil Penelitian

### Akuntabilitas Pengelolaan Objek Wisata Hutan Bakau Di Kabupaten Mamuju

#### 1. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Inefisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggungjawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada *klien atau costumer*-nya.

Akuntabilitas manajerial juga berkaitan dengan akuntabilitas proses (*process accountability*) yang berarti bahwa proses organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan, dengan kata lain tidak terjadi inefisiensi dan ketidak efektifan organisasi. Analisis terhadap akuntabilitas sector publik akan banyak berfokus pada akuntabilitas manajerial.

Dinas pariwisata dalam pengelolaan pariwisata hutan bakau dilakukan dengan cara melakukan pembinaan kepada masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menjaga ekosistem hutan bakau, pembinaan yang dilakukan oleh dinas pariwisata berupa pelatihan seleksi buah, pembibitan dan penanaman pohon bakau. Dinas pariwisata juga memberikan bantuan berupa modal usaha kepada masyarakat sekitar objek wisata untuk meningkatkan perekonomian dan pemerintah melakukan pengawasan

terhadap aktivitas disekitaran objek wisata untuk mengantisipasi kegiatan masyarakat yang mengakibatkan rusaknya ekosistem hutanbakau yang menjadi destinasi wisata.

Menurut Djalil (2014:63) Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Sehingga dapat dikatakan akuntabilitas manajerial sama dengan akuntabilitas kinerja. Pengelolaan organisasi secara ekonomis dapat berjalan ketika para anggota selalu menentukan antara dana yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh saat melaksanakan kegiatan ataupun pengadaan inventaris kantor.

Selama ini sudah banyak program-program dijalankan pemerintah dan Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju sebagai upaya pengelolaan dan merehabilitasi kawasan hutan mangrove yang merupakan salah satu sumber daya alam (SDA) yang memiliki nilai ekologis dan juga ekonomis tinggi, namun sebagian besar usaha ini tidak berkelanjutan/berkesinambungan dan pada akhirnya berujung pada suatu kegagalan. Untuk itu pola pengelolaan yang selama ini digunakan pemerintah yang cenderung bersifat dari atas kebawah (*top down*) harus segera di modifikasi atau dirubah yaitu dengan mencoba melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan kata lain member pemerintah dan Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju bekerjasama dengan masyarakat (*Human system*) sekitar kawasan untuk turut berpartisipasi dalam upaya pengelolaan dan pelestarian hutan bakau ini.

Akuntabilitas manajerial mengenai pendekatan masyarakat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju. Berdasarkan indikator tersebut peneliti kemudian mewawancarai Bapak Usdi, S.Sos selaku Kepala Dinas, mengatakan:

“Pemerintah dan Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju dengan melakukan strategi persuasive dalam bentuk pembinaan-pembinaan. Kegiatan pembinaan merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran dari kelompok sasaran terhadap pesan yang disampaikan. Materi pembinaan meliputi penyuluhan tentang pentingnya hutan mangrove dan pelestariannya, pengelolaan tambak yang ramah lingkungan serta pentingnya organisasi/kelompok masyarakat” (Hasil Wawancara Bapak UI, 23 Maret 2020).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju melakukan beberapa pendekatan kepada masyarakat dalam hal untuk memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap lingkungan baik itu dengan cara memberikan arahan langsung maupun melalui sistematis pembelajaran kelompok. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan Bapak Abdul Rasyid, SE selaku Kepala Bidang Destinasi dan Usaha mengatakan bahwa:

“Kita melakukan beberapa pendekatan dengan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat mengenai apa saja yang mampu diberikan masyarakat terhadap lingkungan setempat, menjaga lingkungan dan beberapa hal mengenai pentingnya melestarikan lingkungan.” (Hasil Wawancara Bapak AR, 23 Maret 2020)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas menyatakan bahwa pendekatan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat yakni dengan secara langsung melakukan penyampaian informasi terkait pentingnya menjaga lingkungan dan pentingnya melestarikan alam. Kemudian selanjutnya dilakukan wawancara

bersama Bapak Munajib selaku pengelola hutan bakau yang mengatakan bahwasannya:

“Sebagai pengelola disini, pendekatan ini saya lakukan dengan mengajak masyarakat untuk ikut serta bergabung baik itu dalam mengelola, memberikan sumbangsih kreativitasnya menuangkan ide untuk menarik pengunjung” (Hasil Wawancara Bapak MB, 24 Maret 2020).

Berdasarkan kutipan kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa pengeloa hutan bakau melakukan pendekatan dengan masyarakat dengan mengajak masyarakat turut serta dalam proses pengelolaan hutan bakau baik itu memperindah dan menarik perhatian khalayak. Kemudian juga dilakukan wawancara bersama Bapak Hamdhan Malik, S.STP selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mengatakan bahwa:

“Pendekatan dengan masyarakat tentu kita adakan sosialisasi secara langsung mengenai lingkungan sekitar objek wisata yang kita jaga bersama, memberikan instruksi dan pengertian kemasyarakat terhadap tanggungjawab lingkungan sekitar yang tetap harus dijaga oleh semua pihak tanpa terkecuali” (Hasil Wawancara Bapak HM, 25 Maret 2020).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas menyatakan bahwasannya pedekatan yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup dan kebersihan yakni pendekatan secara langsung turun kelapangan melakukan kontak langsung memberikan sosialisasi terhadap pentingnya menjaga lingkungan dan peran dan tanggungjawab masyarakat terhadap lingkungan sekitar objek wisata hutan bakau sehingga peranan DLHK bersama dinas pariwisata mampu saling berkolaborasi dalam menciptakan keselarasan. Selanjutnya juga dilakukan wawancara kepada beberapa masyarakat salah satunya yakni Bapak Deni yang mengatakan :

“Pendekatan pemerintah kepada kami masyarakat memang ada pemberitahuan, tidak ada sosialisasi dilakukan, bahkan hanya sedikit masyarakat yang menerima informasi” (Hasil Wawancara Bapak DN, 25 Maret 2020).

Berdasarkan indikator akuntabilitas manajerial mengenai strategi Pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju pada akuntabilitas manajerial objek wisata hutan mangrove. Berdasarkan indikator tersebut peneliti kemudian mewawancarai Bapak Usdi, S.Sos selaku Kepala Dinas, mengatakan:

“Adapun strategi yang dilakukan oleh Pemerintah dan Dinas Pariwisata yaitu dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Melalui pelatihan diharapkan dapat meningkatkan ketrampilan kelompok sasaran terhadap suatu aspek tertentu. Kegiatan pelatihan yang telah dilakukan adalah peningkatan pemahaman dan ketrampilan kelompok sasaran di bidang rehabilitasi mangrove seperti seleksi buah, pembibitan dan penanaman pohon bakau, pelatihan peningkatan pemahaman dan pengembangan kemampuan dalam pengelolaan kelompok, seperti administrasi, pengelolaan keuangan, kepengurusan dan aturan main pelaksanaan program” (Hasil Wawancara Bapak UI, 23 Maret 2020).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas yakni bahwa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah dan Dinas Pariwisata yaitu dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Pemerintah melakukan berbagai cara untuk mampu memberikan arahan kepada masyarakat terhadap pentingnya lingkungan yang baik dan bersih melalui sarana-sarana seperti memberikan pengetahuan kepada masyarakat sekitar kemudian juga mengarahkan masyarakat agar mampu mengelola lingkungan dengan baik dan mampu mengembangkan sumber daya yang ada disekitarnya. Selanjutnya kutipan wawancara berikutnya dengan Bapak Abdul Rasyid, SE selaku Kepala Bidang Destinasi dan Usaha, mengatakan bahwa:

“Strategi pemerintah dalam melakukan manajerial yakni dengan memberikan fasilitas kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat, dan mengikut sertakan masyarakat dalam mengelola hutan bakau ini” (Hasil Wawancara Bapak AR, 23 Maret 2020).

Berdasarkan kutipan hasil wawancara di atas menyatakan bahwa strategi pemerintah dalam akuntabilitas manajerial yakni dengan mengikut sertakan masyarakat baik itu mengelola, memberikan fasilitas untuk berusaha dan memberdayakan masyarakat pada wisata hutan mangrove ini. Kemudian selanjutnya dilakukan wawancara bersama Bapak Munajib selaku pengelola hutan bakau yakni mengatakan:

“Strategi yakni tentu dengan memanfaatkan sumber daya manusia disekitar kita ini, kita punya destinasi wisata yang baik, strateginya memberikan kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk membantu menjaga juga memberikan retribusi kepada pemerintah” (Hasil Wawancara Bapak MB, 24 Maret 2020).

Berdasarkan kutipan hasil wawancara di atas menyatakan bahwa strategi pemerintah yakni dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam sekitar hutan, masyarakat untuk membantu menjaga lingkungan dan tentu memberikan keuntungan bagi pemerintah dari retribusi wisata. Kemudian dilakukan wawancara bersama Bapak Hamdhan Malik, S. STP selaku kepala dinas lingkungan hidup dan kebersihan mengatakan bahwa:

“Ya strategi kita ini mendekati diri kemasyarakat, bekerjasama dengan masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan bersih untuk menciptakan lingkungan yang sehat” (Hasil Wawancara Bapak HM, 25 Maret 2020).

Dari kutipan wawancara diatas menyatakan bahwasannya strategi dinas lingkungan hidup dan kebersihan yakni mendekati diri dan menjalin hubungan kepada masyarakat dalam bekerjasama menjaga dan melindungi lingkungan

sekitar objek wisata hutan bakau, kemudian juga dilakukan wawancara kepada beberapa masyarakat yakni salah satunya Bapak Alfi yang mengatakan bahwa:

“Untuk strateginya pemerintah tentu saya kurang tau dek, kita masyarakat awam disini Cuma mengikuti arahan dari pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah” (Hasil Wawancara Bapak AF, 25 Maret 2020).

Berdasarkan kutipan hasil wawancara di atas bahwa masyarakat tidak mengetahui strategi-strategi pemerintah dalam mengelola objek wisata. Masyarakat berjalan berdasarkan arahan pemerintah.

Berdasarkan indikator akuntabilitas manajerial mengenai langkah pemerintah dalam akuntabilitas objek wisata hutan mangrove pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju pada akuntabilitas manajerial objek wisata hutan mangrove. Berdasarkan indikator tersebut peneliti kemudian mewawancarai Bapak Usdi, S.Sos selaku Kepala Dinas, mengatakan:

“Langkah selanjutnya yang dilakukan pemerintah dan Dinas Pariwisata yaitu kami memberikan bantuan usaha yang merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi mangrove. Bantuan usaha yang diberikan umumnya berkaitan dengan program rehabilitasi mangrove, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu bantuan ini juga ditujukan untuk meningkatkan kondisi social ekonomi kelompok sasaran” (Hasil Wawancara Bapak UI selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju, 23 Maret 2020).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas yakni bahwa Pemerintah dan Dinas Pariwisata sehubungan dengan adanya pemberian bantuan kepada masyarakat setempat yang dikatakan oleh kepala dinas pariwisata masyarakat belum menerima bantuan sosial dalam hal tujuan kondisi sosial perbaikan hutan

mangrove sendiri. Kemudian juga dilakukan wawancara bersama Kepala Bidang Destinasi dan Usaha, Bapak Abdul Rasyid, SE mengatakan bahwa:

“Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dengan memberdayakan masyarakat tentu, memberikan kepada masyarakat fasilitas disekitar objek wisata untuk meningkatkan perekonomian, memberikan bantuan berupa modal usaha dan memang ditujukan bagi masyarakat sekitar” (Hasil Wawancara Bapak AR, 23 Maret 2020).

Berdasarkan kutipan hasil wawancara di atas menyebutkan bahwa langkah pemerintah selanjutnya dengan memberikan masyarakat fasilitas dan bantuan modal usaha. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama Bapak Munajib selaku pengelola hutan bakau, mengatakan bahwa:

“Selanjutnya untuk langkah kedepan dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat tentu akan menciptakan kolaborasi wisata yang baik, perekonomian yang baik-baik bagi masyarakat sekitar juga bagi pendapatan daerah” (Hasil Wawancara Bapak MB, 24 Maret 2020).

Berdasarkan kutipan hasil wawancara di atas bahwa langkah pemerintah kedepan dengan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat tentu akan menciptakan perekonomian dan pendapatan yang baik bagi pemasukan anggaran daerah. Kemudian dilakukan wawancara bersama Bapak Hamdhan Malik, S.STP selaku kepala dinas lingkungan hidup dan kebersihan mengatakan bahwa:

“Kemudian setelah kita melakukan pendekatan dan kerjasama bersama masyarakat sekitar, langkah selanjutnya tentu tetap mengawasi lingkungan sekitar objek wisata, untuk tetap menjaga keseimbangan baik itu dengan masyarakat sekitar, serta wisatawan” (Hasil Wawancara Bapak HM, 25 Maret 2020).

Dari kutipan wawancara diatas menyatakan bahwasannya langkah selanjutnya yang dilakukan dinas lingkungan hidup dan kebersihannya kini melakukan pengawasan terhadap daerah sekitar objek wisata hutan bakau, serta

dilakukan wawancara kepada beberapa masyarakat salah satunya yakni Bapak Randi mengatakan bahwa:

“Langkah pemerintah tentu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan lingkungan yang lestari dan keseimbangan perekonomian dan alam sekitarnya” (Hasil Wawancara Bapak RD, 25 Maret 2020).

Berdasarkan kutipan hasil wawancara di atas menyatakan bahwa langkah selanjutnya pemerintah yakni dengan meningkatkan ekonomi sosial masyarakat, dan menjaga alam sekitar.

Berdasarkan indikator akuntabilitas manajerial mengenai efektivitas dan efisiensi pengelolaan objek wisata hutan mangrove pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju pada akuntabilitas manajerial objek wisata hutan mangrove. Berdasarkan indikator tersebut peneliti kemudian mewawancarai Bapak Usdi, S.Sos selaku Kepala Dinas, mengatakan:

“sejauh ini sehubungan efektivitas dinas pariwisata dalam melakukan kerjanya dalam mengelola hutan mangrove tidak ada masalah, aman terkendali” (Hasil Wawancara Bapak UI, 23 Maret 2020).

Berdasarkan kutipan hasil wawancara di atas menyatakan bahwa efisiensi dan efektivitas pada pengelolaan hutan mangrove baik dikarenakan tidak ada masalah. Kemudian selanjutnya dilakukan wawancara bersama Bapak Abdul Rasyid, SE selaku Kepala Bidang Destinasi dan Usaha mengatakan bahwa :

“Efektivitas dan efisiensi pada pengelolaan objek wisata hutan mangrove ini tidak sulit, kemudian juga banyak dibantu oleh masyarakat sekitar, rehabilitasi dan penghijauan juga rutin dilakukan” (Hasil Wawancara Bapak AR, 23 Maret 2020).

Berdasarkan kutipan hasil wawancara di atas menyatakan bahwa efektivitas dan efisiensi pengelolaan akuntabilitas manajerial pada objek wisata hutan mangrove baik dikarenakan adanya sinergitas dari masyarakat setempat membantu dalam mengelola. Kemudian selanjutnya dilakukan wawancara bersama Bapak Munajib selaku pengelola hutan mangrove yakni :

“Sejauh ini efektivitas serta efisiensi pengelolaan tidak ada masalah, rehabilitasi hutan bakau tidak ada masalah” (Hasil Wawancara Bapak MB, 24 Maret 2020).

Berdasarkan kutipan hasil wawancara di atas bahwa efisiensi dan efektivitas akuntabilitas manajerial objek wisata hutan mangrove tidak ada masalah. Kemudian selanjutnya dilakukan wawancara bersama Bapak Hamdhan Malik, S.STP selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan mengatakan bahwa:

“Efektivitas dan efisiensi pengelolaan objek wisata terhadap lingkungan sekitar alhamdulillah baik, kesadaran masyarakat dan wisatawan tentu berperan cukup besar menjaga lingkungan tetap bersih” (Hasil Wawancara Bapak HM, 25 Maret 2020).

Dari kutipan wawancara diatas menyatakan bahwasannya efektivitas pengelolaan dari dinas lingkungan hidup pada objek wisata hutan bakau aman terkendali dikarenakan kesadaran masyarakat dan wisatawan terhadap pentingnya lingkungan bersih, kemudian juga dilakukan beberapa wawancara bersama masyarakat yakni salah satunya Bapak Dirwan, mengatakan:

“Sejauh ini pemerintah melakukan rehabilitasi dan penghijauan dengan baik” (Hasil Wawancara Bapak DW, 25 Maret 2020).

Dari wawancara diatas menunjukkan rehabilitasi dan penghijauan baik oleh sebab itu efektivitas dan efisiensi baik-baik saja.

Berdasarkan indikator akuntabilitas manajerial mengenai partisipasi masyarakat pada pengelolaan objek wisata hutan mangrove pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju pada akuntabilitas manajerial objek wisata hutan mangrove. Berdasarkan indikator tersebut peneliti kemudian mewawancarai Bapak USDI, S.Sos selaku Kepala Dinas, mengatakan:

“Partisipasi masyarakat alhamdulillah baik, kemudian kita dorong terus jadi partisipasi masyarakat membantu mengelola objek wisata hutan bakau ini sangat baik” (Hasil Wawancara Bapak UI, 23 Maret 2020).

Berdasarkan kutipan hasil wawancara di atas bahwa partisipasi masyarakat baik dalam membantu pengelolaan objek wisata hutan mangrove. Kemudian dilanjutkan wawancara bersama Bapak Abdul Rasyid, SE selaku Kepala Bidang Destinasi dan Usaha mengatakan bahwa :

“Masyarakat partisipasi dengan baik, mereka membantu kami mengelola dan menjaga dinas pariwisata” (Hasil Wawancara Bapak AR, 23 Maret 2020).

Berdasarkan kutipan hasil wawancara di atas menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata hutan mangrove baik. Kemudian dilakukan wawancara bersama Bapak Hamdhan Malik, S.STP selaku kepala dinas lingkungan hidup dan kebersihan, mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah, sejauh ini partisipasi masyarakat kita responnya sangat baik, untuk tetap menjaga lingkungan yang sehat dan bersih” (Hasil Wawancara Bapak HM, 25 Maret 2020).

Dari wawancara diatas menyatakan bahwasannya masyarakat partisipatif terhadap lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman pada objek wisata hutan bakau. Beberapa masyarakat yakni Bapak Fajar salah satunya mengatakan bahwa:

“Kami masyarakat siap membantu, partisipasi masyarakat 80 berjalan memantu pemerintah pelaksanaan partisipasi masyarakat” (Hasil Wawancara Bapak FJR, 25 Maret 2020).

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara pada indikator akuntabilitas manajerial dapat disimpulkan pendekatan pemerintah kepada masyarakat untuk memberikan pehaman dan kesadaran terhadap lingkungan baik itu dengan cara memberikan arahan langsung maupun melalui sistematika pembelajaran kelompok. Namun berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa sebagian masyarakat belum memperoleh informasi secara lengkap dan belum dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemahaman lingkungan objek wisata hutan mangrove secara merata dan menyeluruh, terutama terhadap masyarakat di sekitar objek wisata hutan mangrove Kabupaten Mamuju dan strategi manajerial dengan memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap kelompok sasaran dalam melakukan rehabilitasi dan pembibitan hutan mangrove serta melakukan upaya penyadaran kepada masyarakat dalam meningkatkan partisipasi pentingnya menjaga dan melestarikan hutan mangrove sebagai hutan wisata serta memcegah terjadinya bencana seperti pengikisan air laut, dan banjir. Serta terkait dengan langkah berikut yang diambil oleh pemerintah yakni, dengan meningkatkan sinergitas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata, menjadikan hal ini menjadi tanggungjawab bersama, menaikkan perekonomian masyarakat dan tetap menjaga lingkungan objek wisata hutan mangrove. Mengenai efektivitas dan

efisiensi pengelolaan objek wisata hutan bakau Kabupaten Mamuju dapat disimpulkan tidak ada masalah dan terkendali dengan baik, dan untuk mengenai partisipasi masyarakat pada akuntabilitas manajerial yakni baik. Masyarakat memberikan perhatian yang cukup besar pada pengelolaan objek wisata hutan mangrove.

Adapun berdasarkan hasil observasi peneliti menunjukkan pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat belum ada, baik pembinaan secara langsung oleh pemerintah terkait kepada masyarakat. Hanya saja pembinaan dari DLHK dan masih minimnya anggaran untuk melakukan pembinaan oleh pemerintah, begitu pula sehubungan dengan bantuan usaha oleh pemerintah kepada masyarakat hingga saat ini masih sedikit kepada masyarakat, jadi pada hasil wawancara dan fakta lapangan tidak sesuai.

## 2. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

Menurut Djalil (2014:63) Akuntabilitas program adalah suatu pertimbangan organisasi terkait dengan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai atau tidak. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah ditentukan sampai pada pelaksanaan program. Setiap bidang-bidang ataupun anggota yang baru memiliki program-program yang harus dikerjakan sesuai dengan bidang masing-masing dengan rancangan yang sesuai dengan tujuan organisasi. Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

Dinas pariwisata melakukan program penghijaun sebagai upaya untuk menjaga dan melestarikan hutan bakau, pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik perhatian masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga dan melestarikan hutan bakau, dinas pariwisata bekerjasama dengan dinas lingkungan hidup sebagai penyuplai bibit bakau secara rutin melakukan penghijaun, program lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk menarik wisatawan adalah memperbaiki beberapa fasilitas wisata baik berupa jalan, jembatan menuju hutan bakau, tempat istirahat dan beberapa fasilitas pendukung lainnya.

Berdasarkan indikator Akuntabilitas Program mengenai akuntabilitas program pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju,

Berdasarkan indicator tersebut peneliti kemudian mewawancarai Bapak Usdi, S.Sos selaku Kepala Dinas, mengatakan:

“Cara dinas pariwisata dalam melakukan program yaitu penghijauan dan rehabilitasi hutan mangrove hal ini masyarakat akan berpartisipasi secara sukarela dalam kegiatan penghijauan dan rehabilitasi, jika memiliki motivasi berperan serta. Motivasi ini berfungsi sebagai pendorong sehingga timbul tindakan nyata yang dilakukan dalam bentuk aksi penghijauan ataupun rehabilitasi. Motivasi masyarakat melakukan kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan mangrove akan timbul, bila adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk melakukan sesuai dengan kemampuannya melalui pendampingan. Kegiatan penghijauan ataupun rehabilitasi yang dilakukan dimulai dengan keterlibatan dari perencanaan, proses, monitoring dan evaluasi sehingga keberadaan masyarakat berarti pada program tersebut” (Hasil Wawancara Bapak UI, 23 Maret 2020).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas yakni bahwa belum ada kejelasan tugas mengenai pembersihan dan penghijauan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan hutan mangrove hal tersebut membuat masyarakat yang turun tangan melakukan rehabilitasi hutan mangrove tugas pemerintah dalam hal ini menjadi pendamping masyarakat terhadap kepeduliannya dengan lingkungan sekitar khususnya hutan mangrove. Selanjutnya hasil wawancara bersama Bapak Abdul Rasyid, SE selaku Kepala Bidang Destinasi Dan Usaha terkait akuntabilitas pengelolaan objek wisata hutan bakau mengatakan bahwa:

“Pemanfaatan mangrove tidak hanya dengan melakukan penebangan kayunya. Pemanfaatan lain dari mangrove dapat diperoleh dari buah dan daunnya yang telah mulai disosialisasikan diberbagai media. Pemanfaatan *non* kayu tersebut disosialisasikan dan diimplementasi dengan pelatihan. Salah satu contoh pemanfaatan *non* kayu adalah pengolahan buah mangrove menjadi bahan makanan. Contoh makanan dari mangrove adalah Buah perpat menghasilkan makanan: sirup, selai, dodol, permen, dan lain-lain. Nah disinilah kami dari Dinas Pariwisata harus mengelola secara baik

hutan mangrove ini karena manfaatnya banyak sekali” (Hasil Wawancara Bapak AR, 23 Maret 2020).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas yakni bahwa Dinas Pariwisata ada beberapa manfaat yang diberikan hutan mangrove bukan hanya sebagai menjaga lingkungan dari abrasi laut namun pemanfaatan mangrove sendiri juga masih banyak dan bias dijadikan sebagai bahan konsumsi oleh masyarakat sekitar, agar masyarakat mampu-mampu mengelola dinas pariwisata memberikan perannya kepada masyarakat untuk mampu memberdayakan masyarakat. Kemudian selanjutnya dilakukan wawancara bersama Bapak Munajib selaku pengelola Hutan Bakau dengan hasil wawancara berikutnya mengatakan bahwa:

”Ya saya selaku pengelola hutan mangrove ini merasa antusiaslah dalam mengelola hutan ini karena memberikan dampak positif terutama dampak terhadap perekonomian masyarakat yang seperti membuka lapangan usaha kerja dan perekrutan dan juga supaya agar wisatawan lebih tertarik ketempat wisatahutan mangrove ini” (Hasil Wawancara Bapak MB, 24 Maret 2020).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara pada informan di atas bahwa pada pengelolaan hutan mangrove ini tentu memberikan dampak yang baik bagi masyarakat sehingga masyarakat merasa antusias. Kemudian juga dilakukan beberapa wawancara bersama masyarakat, Bapak Deni mengatakan bahwa:

“Sejauh ini kami masyarakat sekitar disini belum ada sosialisasi jelas, apalagi untuk pemanfaatan hutan bakau daerah disini dek” (Hasil Wawancara Bapak DN, 25 Maret 2020).

Berdasarkan hasil kutipan pada informan di atas bahwa pengelolaan hutan bakau pada masyarakat masih sangat kurang, baik dari sosialisasi, rehabilitasi, dan pemanfaatan hutan mangrove.

Berdasarkan indikator Akuntabilitas Program mengenai pencapaian program pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju, Berdasarkan indikator tersebut peneliti kemudian mewawancarai Bapak Usdi, S.Sos selaku Kepala Dinas, mengatakan:

“Pencapaian kita ada beberapa, baik itu dari rehabilitasi yang kitalakukan pada hutan mangrove, sedangkan untuk pemanfaatannya sendiri saat ini kita masih melakukan proses jadi kita belum bisa bicara hasil pencapaian mungkin disini” (Hasil Wawancara Bapak UI, 23 Maret 2020).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara pada di atas bahwa pencapaian pada akuntabilitas program dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten mamuju ini ada pada rehabilitasi hutan bakau yang dirawat sedemikian baik, namun pada pemanfaatan hutan mangrove belum bisa diperoleh pencapaian disebabkan masih dalam tahapan proses pelaksanaan. Selanjutnya hasil wawancara bersama Bapak Abdul Rasyid, SE selaku kepala bidang Destinasi dan Usaha terkait pencapaian program pada pengelolaan objek wisata hutan bakau yakni mengatakan bahwa:

“Untuk pencapaian program, kita sudah tercapai ini sekiranya kita sudah melakukan penghijauan secara berkala, kita juga sudah memperbaiki beberapa fasilitas sekitar hutan bakau untuk menarik perhatian wisatawan lokal tentunya” (Hasil Wawancara Bapak AR, 23 Maret 2020).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas menyatakan bahwa pencapaian yang dilakukan pemerintah dalam akuntabilitas program hutan mangrove Kabupaten Mamuju yakni penghijauan dan perbaikan fasilitas bagi wisatawan yang akan berkunjung pada hutan mangrove. Kemudian selanjutnya dilakukan wawancara bersama Bapak Munajib selaku pengelola Hutan Bakau dengan hasil wawancara berikutnya mengatakan bahwa:

“Pencapaian pada program ini seperti yang kita lihat, kita melakukan perawatan terhadap hutan mangrove, menyediakan tempat istirahat, dan memberikan sentuhan terhadap hutan mangrove agar terlihat cantik dan menarik wisatawan. (Hasil Wawancara Bapak MB, 24 Maret 2020).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas menyatakan bahwa pencapaian program pada pengelolaan hutan mangrove kabupaten mamuju yakni mampu memberikan daya tarik pada wisatawan, dan perbaikan sarana prasarana agar nyaman bagi wisatawan. Kemudian juga dilakukan beberapa wawancara bersama masyarakat, yakni Bapak Alfi yang mengatakan bahwa:

“Untuk pencapaian program mereka saya kurang tau, karena memang kita tidak tau mengenai apa saja programnya” (Hasil Wawancara Bapak AF, 25 Maret 2020).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas menyatakan bahwa pencapaian program pada pengelolaan hutan bakau, masyarakat tidak mengetahui dikarenakan tidak terlibatnya masyarakat terhadap program pemerintah terkait wisata hutan bakau Kabupaten Mamuju.

Berdasarkan indikator Akuntabilitas Program mengenai alternatif program kerja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju, Berdasarkan indikator tersebut peneliti kemudian mewawancarai Bapak Usdi, S.Sos selaku Kepala Dinas, mengatakan:

“Untuk alternatif program, kita ada beberapa kalau memang program-program kita ini belum mampu terlaksana, misalnya bagi pemanfaatan kalau belum bisa dilaksanakan kita pandah ke program yang mampu dijangkau dan bisa memberikan manfaat bukan hanya kepada pemerintah tentu juga masyarakat harus merasakan manfaatnya dengan memberikan daya tarik pada wisatawan contohnya” (Hasil Wawancara Bapak UI, 23 Maret 2020).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas menyatakan bahwa alternatif program yang dilakukan oleh pemerintah ini yakni melaksanakan program kerja yang mudah dijangkau, memberikan perubahan tidak hanya bagi pemerintah tapi juga untuk masyarakat sekitar. Selanjutnya hasil wawancara bersama Bapak Abdul Rasyid, SE selaku Kepala Bidang Destinasi dan Usaha terkait alternatif program pada pengelolaan objek wisata hutan bakau yakni mengatakan bahwa:

“Alternatif inikan kalau ada program kita tidak berjalan, kita tentu harus memiliki alternatif untuk itu, karena kita ada pertanggungjawaban juga terkait pelaporan, tapikan sejauh ini tidak ada masalah, kita memang perlu mempersiapkan alternatif” (Hasil Wawancara Bapak AR, 23 Maret 2020).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas menyatakan bahwa alternatif program sangat dibutuhkan dan perlu dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan kegagalan program untuk menggantikan, namun sejauh ini tidak ada program yang terganti. Kemudian selanjutnya dilakukan wawancara bersama Bapak Munajib selaku pengelola Hutan Bakau dengan hasil wawancara berikutnya mengatakan bahwa:

“Dinas Pariwisata tentu membuat alternatif bagi pengelolaan wisata, baik itu dari segi rencana, kalau plan A tidak bisa kita beralih ke plan B, jadi alternatif pada program itu ada dek dan harus” (Hasil Wawancara Bapak MB, 24 Maret 2020).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas menyatakan bahwa pada pengelolaan wisata hutan mangrove, tentu pemerintah menyediakan pilihan alternatif bagi program kerjanya untuk melakukan antisipasi. Kemudian dilakukan beberapa wawancara bersama Bapak Fajar selaku masyarakat setempat yang mengatakan :

“Alternatif program pemerintah kita tidak tau dek, seperti apa, rencananya apa, kita masyarakat sekitar disini hanya mengikuti arahan dari pemerintah seperti ini dan apasaja yang harus kami lakukan ini” (Hasil Wawancara Bapak FJR, 25 Maret 2020).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas menyatakan bahwa masyarakat tidak mengetahui program kerja, rencana program, dan bahkan apa saja alternatif pemerintah dalam melakukan pengelolaan pada hutan mangrove.

Berdasarkan indikator Akuntabilitas Program mengenai mutu dan kualitas program kerja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju, Berdasarkan indikator tersebut peneliti kemudian mewawancarai Bapak USDI, S.Sos selaku Kepala Dinas, mengatakan:

“Mutu dan kualitas yang diberikan alhamdulillah sejalan dengan visi dan misi dinas pariwisata, mewujudkan mamuju yang maju, dan ramah lingkungan, menjaga lingkungan sekitar dan memberikan peningkatan sector ekonomi” (Hasil Wawancara Bapak UI, 23 Maret 2020).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas menyatakan bahwa mutu dan kualitas program yang diberikan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten mamuju sejalan dengan visi dan misi, ramah lingkungan dalam hal ini menjaga alam dan melestarikan lingkungan. Selanjutnya hasil wawancara bersama Bapak Abdul Rasyid, SE selaku Kepala Bidang Destinasi dan Usaha terkait mutu dan kualitas program pada pengelolaan objek wisata hutan bakau yakni mengatakan bahwa:

“Kita memberikan yang terbaik untuk pelayanan, maupun program kerja bagi masyarakat di Kabupaten Mamuju, apalagi hutan mangrove ini tidak hanya memberikan peningkatan sektor ekonomi masyarakat setempat juga memberikan retribusi pada daerah kita ini untuk memberikan fasilitas yang baik.” (Hasil Wawancara Bapak AR, 23 Maret 2020).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas menyatakan bahwa pemerintah memberikan kerja dan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan tentu bagi daerah Kabupaten Mamuju itu sendiri. Kemudian Selanjutnya dilakukan wawancara bersama Bapak Munajib selaku pengelola Hutan Bakau dengan hasil wawancara berikutnya mengatakan bahwa:

“Untuk kualitas dan mutu itu tidak ada masalah, kita berikan yang terbaik, apalagi kita di pariwisata dilihat dan disorot oleh semua pihak. Tentu kita harus memberikan yang terbaik.” (Hasil Wawancara Bapak MB, 24 Maret 2020).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas menyatakan bahwa dinas pariwisata disorot cukup banyak terhadap kualitas dan mutu pada pengelolaan pariwisata tentu harus memberikan mutu dan kualitas yang baik, kemudian dilakukan wawancara kepada beberapa masyarakat salah satunya yakni Bapak Randi yang mengatakan:

“Menurut saya kalau dari segi program kerja baik, rehabilitasi perbaikan sarana dan prasarana daerah sekitar objek wisata hutan bakau menarik dan bersih” (Hasil Wawancara Bapak RD, 25 Maret 2020)

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas menyatakan bahwa kualitas dan mutu pemerintah dalam pada akuntabilitas program, dilakukan dengan baik dikarenakan perawatan sarana dan prasarana dan lingkungan sekitar objek wisata yang bersih.

Berdasarkan indikator Akuntabilitas Program mengenai program pada masing-masing bidang pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju, Berdasarkan indikator tersebut peneliti kemudian mewawancarai Bapak Usdi, S.Sos selaku Kepala Dinas, mengatakan:

“Kalau untuk itu kita belum melaksanakan program kepada masing-masing bidang untuk program hutan bakau ini, karena memang belum masuk prioritas program kerja di dinas pariwisata ini” (Hasil wawancara pada Hasil Wawancara Bapak UI, 23 Maret 2020)

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas menyatakan bahwa pelaksanaan program belum dilaksanakan pada masing-masing bidang pada dinas pariwisata dan kebudayaan dikarenakan objek wisata hutan bakau belum masuk prioritas program. Selanjutnya hasil wawancara bersama Bapak Abdul Rasyid, SE selaku Kepala Bidang Destinasi dan Usaha terkait mutu dan kualitas program pada pengelolaan objek wisata hutan bakau yakni mengatakan bahwa:

“Untuk saat ini objek wisata hutan bakau ini masih ada dibawah naungan bidang promosi dan pemasaran, tidak semua bidang mampu mengelola hutan bakau, kemudian objek wisata hutan bakau ini masih proses pengenalan dengan masyarakat luas.” (Hasil Wawancara Bapak AR, 23 Maret 2020).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa objek wisata hutan bakau kabupaten mamuju ini berada pada bidang promosi dan pemasaran untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat umum. Kemudian selanjutnya dilakukan wawancara bersama Bapak Munajib selaku pengelola Hutan Bakau dengan hasil wawancara berikutnya mengatakan bahwa:

“Untuk pengelolaan kami dinaungi oleh dinas pariwisata, namun tidak semua bidang yang turut andil dalam memberikan sumbangsih pada program objek wisata hutan bakau ini” (Hasil Wawancara Bapak MB, 24 Maret 2020).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas diketahui bahwa pengelolaan objek wisata hutan mangrove tidak ditangani oleh semua bidang dinas pariwisata.

Kemudian dilakukan beberapa wawancara bersama masyarakat yakni Bapak Dirwan yang menyatakan bahwa:

“Kalau untuk itu saya kurang paham dek” (Hasil Wawancara Bapak DW, 25 Maret 2020).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas menyatakan bahwa masyarakat tidak mengetahui pengelolaan hutan mangrove Kabupaten Mamuju.

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara pada indikator akuntabilitas program, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam mengelola hutan mangrove ini dengan beberapa cara yakni melakukan rehabilitasi seperti penghijauan, dan perawatan hutan mangrove sendiri serta pemanfaatan dari hasil mangrove bagi masyarakat sekitar, dengan memanfaatkan buah mangrove sebagai bahan makanan dan buah tangan bagi masyarakat sekitarnya sebagai langkah pemerintah dalam hal pertanggungjawaban terhadap hutan mangrove secara fisik agar hutan mangrove tetap terawat dan lestari.

Mengenai pencapaian yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Mamuju yakni, pencapaian penghijauan dan rehabilitasi hutan mangrove serta perbaikan sarana dan prasarana bagi wisatawan yang melakukan kunjungan wisata, dan terkait dengan alternatif program pemerintah yakni, pemerintah tentu memiliki antisipasi dan memiliki beberapa pilihan alternatif untuk mengantisipasi, terjadinya kegagalan pada program kerja pada pengelolaan hutan mangrove kabupaten mamuju.

Sedangkan untuk mengenai kualitas dan mutu yakni, pemerintah memberikan kerja dan pelayanan maksimal pada objek wisata dalam hal ini wisata hutan mangrove, perbaikan sarana dan prasarana, untuk menarik pengunjung dan

konsistensi lingkungan sekitar hutan mangrove yang bersih. Serta mengenai penanganan masing-masing bidang yakni belum secara keseluruhan, melainkan hutan mangrove ditangani oleh bidang promosi dan pemasaran untuk pengenalan kepada masyarakat umum.

Adapun berdasarkan hasil observasi peneliti menunjukkan fakta bahwa pada dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Mamuju, belum adanya program yang jelas mengenai pengelolaan pariwisata hutan mangrove, pemerintah belum memasukkan hutan mangrove sebagai salah satu program kerja yang harus dialokasikan. Serta juga masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap pemanfaatan hutan mangrove. Rehabilitasi hutan mangrove memang dilakukan oleh pemerintah tapi hanya satu kali dan tidak lagi dilakukan dalam 2 tahun terakhir, hal ini turut berpengaruh terhadap antusias masyarakat pada pengelolaan sumber daya pada hutan mangrove di Kabupaten Mamuju.

### 3. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*money public*) secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama publik.

Menurut Djalil (2014:63) Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik dalam menggunakan uang publik (*publik money*) secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana sehingga

menimbulkan korupsi. Akuntabilitas finansial lebih menitik beratkan pada ukuran anggaran dan finansial. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sangat penting karena menjadi perhatian utama masyarakat.

Berdasarkan indikator akuntabilitas finansial mengenai bentuk akuntabilitas finansial pada pengelolaan objek wisata hutan mangrove pada dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Mamuju pada akuntabilitas manajerial objek wisata hutan mangrove. Berdasarkan indikator tersebut peneliti kemudian mewawancarai Bapak Usdi, S.Sos selaku Kepala Dinas, mengatakan:

“Bentuk akuntabilitasnya kita yakni dari laporan keuangan, laporan pertanggungjawaban anggaran yang digunakan” (Hasil Wawancara Bapak UI, 23 Maret 2020).

Berdasarkan kutipan hasil wawancara di atas menyatakan bahwa bentuk akuntabilitas finansial pemerintah yakni dengan laporan keuangan, dan laporan pertanggungjawaban anggaran yang digunakan. Kemudian selanjutnya dilakukan wawancara bersama Bapak Abdul Rasyid, SE selaku Kepala Bidang Destinasi dan Promosi, mengatakan bahwa:

“Kita ada laporan pertanggungjawaban secara detail dan dipertanggungjawabkan pada atasan, dan inspektorat terkait pemeriksaan.” (Hasil Wawancara Bapak AR, 23 Maret 2020).

Berdasarkan kutipan hasil wawancara di atas bahwa akuntabilitas finansial ini dengan laporan pertanggungjawaban terhadap pemeriksaan keuangan. Kemudian dilakukan wawancara bersama Bapak Munajib selaku pengelola objek wisata hutan bakau, mengatakan:

“Jadi setiap penggunaan keuangan yang digunakan, kita catat kemudian dilaporkan, baik secara tertulis dan langsung” (Hasil Wawancara Bapak MB, 24 Maret 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengatakan bahwa segala pemakaian keuangan akan dilaporkan baik itu secara tertulis maupun langsung.

Berdasarkan indikator akuntabilitas finansial mengenai transparansi akuntabilitas finansial pada pengelolaan objek wisata hutan mangrove pada dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Mamuju pada akuntabilitas manajerial objek wisata hutan mangrove. Berdasarkan indikator tersebut peneliti kemudian mewawancarai Bapak Usdi, S.Sos selaku Kepala Dinas, mengatakan:

“Kalau laporan keuangan dalam pengelolaan hutan bakau itu hanya sebatas internal Dinas Pariwisata, sehingga Dinas Pariwisata belum dapat memberikan laporan tersebut kepada masyarakat terkait pengelolaan hutan bakau” (Hasil Wawancara Bapak UI, 23 Maret 2020).

Berdasarkan kutipan hasil wawancara dari informan tersebut bahwa keuangan pada pengelolaan hutan mangrove belum sepenuhnya terperinci dikarenakan hutan mangrove sendiri programnya belum dijalankan oleh sebab itu akuntabilitas hanya baru sebatas internal dan tidak terbuka secara luas. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan Bapak Munajib selaku pengelola hutan bakau mengatakan bahwa:

“Masyarakat selama ini belum mengetahui tentang laporan keuangan terkait pengelolaan hutan bakau karena dana yang dikeluarkan harus transparanlah sesuai dengan kebutuhan pengelolaan hutan bakau ini sehingga tidak terjadinya korupsi.” (Hasil Wawancara Bapak MB, 24 Maret 2020)

Berdasarkan hasil kutipan wawancara informan di atas yakni bahwa pelaporan keuangan dana untuk pengelolaan hutan bakau belum dibuat oleh internal Dinas Pariwisata dengan tidak mempublikasikan dana tersebut.

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara di atas pada indikator akuntabilitas finansial, maka dapat disimpulkan manajemen secara finansial pada wisata hutan bakau di Kabupaten Mamuju, bentuk akuntabilitas yakni dengan memberikan laporan pertanggungjawaban dan laporan penggunaan anggaran. Melainkan pemerintah hanya melakukan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana dalam membantu pengelolaan hutan mangrove agar tetap terjaga dan lestari.

Kemudian adapun berdasarkan hasil observasi peneliti menunjukkan fakta bahwa pengelolaan keuangan disebabkan program rehabilitasi hutan bakau sendiri belum dianggarkan, sehingga belum ada pelaporan yang bias dipertanggungjawabkan mengenai anggaran keuangan yang ada oleh dinas pariwisata, dan tidak dilakukan transparansi keuangan kepada masyarakat.

### **C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Akuntabilitas Pengelolaan Objek Wisata Hutan Bakau Di Kabupaten Mamuju**

Penerapan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka sektor pariwisata secara penuh menjadi tanggungjawab dari masing-masing Kabupaten atau Kota. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Mamuju merupakan salah satu daerah tujuan wisata nasional yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

Penetapan ini tentunya tidak terlepas dari pertimbangan kekayaan potensi alam dan budaya sebagai daya tarik wisata di wilayah provinsi Sulawesi Barat baik oleh wisatawan nusantara, di Kabupaten Mamuju terdapat objek wisata yang beragam seperti wisata alam, wisata budaya maupun wisata sejarah. Keadaan ini ditunjang oleh beberapa faktor geografis seperti, keadaan topografi, iklim, flora, fauna, dan kekayaan alam serta keadaan social budayanya.

Namun disisi lain memunculkan kekhawatiran baru apakah pemberlakuan peraturan pengelolaan hutan bakau tersebut di era otonomi daerah dapat menjamin kelestarian sumber daya alam termasuk didalamnya bagaimana agar dengan otonomi daerah dapat dicapai pemanfaatan sumber daya hutan yang adil dan berkelanjutan. Dalam suatu kegiatan, faktor pendukung dan penghambat sudah pasti menyertai dalam setiap kegiatan tersebut, faktor pendukung pengelolaan mangrove di Kabupaten Mamuju, diantaranya :

1. Faktor Pendukung
  - a. Salah satu faktor pendukung strategi pengelolaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju karena adanya dukungan dan kerjasama dengan beberapa pihak yang terlibat dalam proses pengembangan dan pengelolaan hutan bakau, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Munajib selaku pengelolahutan bakau berikut ini, mengatakan:

“Adanya kerjasama dengan kemitraan dan pemangku kepentingan di sector wisata, seperti terjalannya komunikasi antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju dengan berbagai elemen masyarakat Dusun, khususnya masyarakat yang tergabung dalam kelompok sadar lingkungan atau kelompok Aku Cinta Indonesia (ACI) inilah sebagai

pengelola pengembangan hutan bakau di Kabupaten Mamuju” (Hasil Wawancara Bapak MB, 24 Maret 2020).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara informan di atas bahwa Adanya kerjasama dengan kemitraan dan pemangku kepentingan di sector wisata, seperti terjalannya komunikasi antara dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Mamuju dengan berbagai elemen masyarakat dusun dalam mengelola hutan bakau di Kabupaten Mamuju.

- b. Adanya beberapa bantuan dari pihak-pihak yang ikut berpartisipasi dan mendukung proses pemeliharaan hutan bakau di Kabupaten Mamuju, bantuan tersebut diserahkan langsung kepada masyarakat setempat. Sebagaimana pernyataan dari Bapak Usdi, S.Sos selaku Kepala Dinas Pariwisata, sebagai berikut:

“Adanya bantuan langsung dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) berupa dana dan bibit pohon bakau yang diserahkan langsung kepada ketua kelompok Aku Cinta Indonesi (ACI) dan dari berbagai pihak yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan hutan bakau sebagai kawasan objek wisata. Adanya bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI berupa pembangunan jembatan penghubung untuk menikmati spot dan pemandangan yang rimbun hutan bakau di kabupaten Mamuju” (Hasil Wawancara Bapak UI, 23 Maret 2020).

Berdasarkan kutipan hasil wawancara dari informan di atas yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) telah memberikan bantuan berupa dana dan bibit pohon bakau yang diserahkan langsung kepada ketua kelompok Aku Cinta Indonesia (ACI) dan dari berbagai pihak yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan hutan bakau sebagai kawasan objek wisata serta bantuan berupa pembangunan jembatan penghubung

untuk menikmati spot dan pemandangan yang rimbun hutan bakau di Kabupaten Mamuju.

- c. Pembangunan fasilitas yang ada merupakan sumbangan langsung dari Kementerian Perikanan dan Kelautan RI, seperti pembuatan dermaga atau jembatan penghubung dan bibit pohon bakau yang diserahkan kepada masyarakat. Dan baru-baru ini mendapat bantuan tunai seratus juta rupiah sebagai bantuan pengembangan hutan bakau, berikut pernyataan oleh Bapak Munajib selaku Pengelola hutan bakau berikut :

“Sarana dan Prasarana untuk pengunjung disiapkan dikawasan hutan bakau seperti tersedianya sewa villa, tempat makan, sarana parkir, tempat beribadah, toilet, dll. Yang dikelola oleh masyarakat sekitar, akses menuju kelokasi objek wisata hutan bakau sudah beraspal mulus, dan ada beberapa papan penunjuk informasi menuju ke objek wisata hutan bakau yang telah dipasang oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju, berkat bantuan CSR dari Bank Sulselbar, kemudian pembangunan gerbang wisata.” (Hasil Wawancara Bapak MB, 24 Maret 2020).

Berdasarkan kutipan hasil wawancara informan tersebut mengatakan bahwa Dinas Pariwisata belum membangun sarana dan prasarana untuk pengunjung di kawasan hutan bakau seperti tersedianya sewa villa, tempat makan, sarana parkir, tempat beribadah, toilet, dll. Karena faktor anggaran yang terbatas.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai faktor pendukung pada pengelolaan objek wisata hutan bakau yang ada di Kabupaten Mamuju ini yakni, partisipasi masyarakat dalam secara sukarela dalam pengelolaan objek wisata hutan bakau. Serta penyediaan bibit dan bantuan

pemeliharaan pada objek wisata oleh DLHK yang cukup memberikan daya tarik kepada wisatawan lokal untuk berkunjung di objek wisata hutan bakau.

## 2. Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat Pengembangan Hutan Mangrove di Kabupaten Mamuju diantaranya :

- a. Ada beberapa faktor penghambat Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju dalam pengelolaan hutan bakau, salah satunya yaitu dana pengelolaan yang belum memadai. Sehingga Pengembangan potensi wisata belum merata, padahal ada beberapa hutan beberapa hutan bakau yang ada di Kabupaten Mamuju tetapi belum dikembangkan karena keterbatasan biaya dan sumber daya manusia, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Usdi, S.Sos selaku Kepala Dinas Pariwisata, mengatakan bahwa:

“Belum adanya penyerahan dana dari Pusat, jadi belum bias mengelolah hutan bakau secara menyeluruh, karena apa yang saat ini ada dikawasan hutan bakau seperti jembatan penghubung itu merupakan sumbangan langsung dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.” (Hasil Wawancara Bapak UI, 24 Maret 2020).

Berdasarkan kutipan hasil wawancara informan tersebut mengatakan bahwa belum adanya penyerahan dana dari pusat sehingga tidak bias mengelola hutan bakau secara menyeluruh bahkan jembatan penghubung itu merupakan sumbangan langsung dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

- b. Faktor penghambat lainnya atau kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata dan pemerintah desa dalam mengembangkan hutan bakau adalah terbatasnya

kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam mengelolah dan mengembangkan potensi hutan bakau yang ada sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Munajib selaku pengelola hutan bakau :

“Terbatasnya kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia di sekitar objek wisata dalam memanfaatkan potensi yang ada. Kepribadian dan latar belakang masyarakat yang berbeda-beda terkadang membuat sedikit kesulitan dalam menghadapi dan mengajak masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dan pelestarian hutan bakau di dusun Saluleang. Karena sebagian dari mereka adalah nelayan yang memiliki kesibukan di laut, sehingga waktu mereka dalam mengelolah dan mengembangkan hutan bakau masih kurang” (Hasil Wawancara Bapak MB, 23 Maret 2020).

Berdasarkan kutipan hasil wawancara informan tersebut mengatakan bahwa masih terbatasnya kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia di sekitar objek wisata dalam memanfaatkan potensi yang ada. Kepribadian dan latar belakang masyarakat yang berbeda-beda terkadang membuat sedikit kesulitan dalam menghadapi dan mengajak masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dan pelestarian hutan bakau di Dusun Saluleang Kabupaten Mamuju.

- c. Pihak dinas pariwisata mengajak dan menyakinkan masyarakat untuk berkunjung ke wisata hutan bakau Dusun Saluleang, dalam hal ini Dinas Pariwisata harus memberikan informasi yang jelas dan menarik bagi pengunjung untuk berwisata di hutan bakau Dusun Saluleang, sebagaimana pernyataan dari Bapak Usdi, S.Sos selaku Kepala Dinas Pariwisata:

“Bagaimana menyampaikan informasi kepada masyarakat dan menyakinkan masyarakat agar mau berkunjung ke kawasan objek wisata hutan bakau di

Dusun Saluleang. Tentunya dengan memberikan informasi yang akurat dan jelas mengenai kawasan objek wisata hutan bakau” (Hasil Wawancara Bapak UI, 23 Maret 2020).

Berdasarkan kutipan hasil wawancara informan tersebut mengatakan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju harus menyampaikan informasi kepada masyarakat dan menyakinkan masyarakat agar mau berkunjung ke kawasan objek wisata hutan bakau di Dusun Saluleang dengan memberikan informasi yang akurat dan jelas mengenai kawasan objek wisata hutan bakau.

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara pada indikator faktor penghambat dalam mengelola hutan bakau ini, maka dapat disimpulkan adalah proses rehabilitasi yakni kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam mengelola hutan bakau sendiri, dan juga kurangnya minat masyarakat melakukan kunjungan wisata pada hutan bakau.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada faktor penghambat pengelolaan objek wisata hutan bakau yakni anggaran yang terbatas untuk memberikan perawatan dan penyediaan sarana dan prasarana yang baik serta kurangnya keterampilan sumber daya manusia untuk melaksanakan pengelolaan objek wisata hutan bakau dengan baik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada indikator akuntabilitas program, pelaksanaan program oleh dinas pariwisata mengenai hutan mangrove belum masuk anggaran pemerintah untuk tahun 2019-2020. Namun akan diprogramkan pada anggaran tahun 2021-2022.
2. Pada indikator akuntabilitas manajerial, Pemerintah dan Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju dengan bekerja sama dengan masyarakat dalam pengelolaan (rehabilitasi) mangrove dilakukan secara gotong royong dapat dilihat sebagai upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan nilai ekosistem mangrove. Melalui bantuan pemeliharaan secara sukarela masyarakat setempat, bantuan bibit dan penyuluhan serta pendampingan dari DLHK, strategi pelatihan dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan (rehabilitasi) mangrove serta menjaganya. Serta strategi bantuan usaha sebagai upaya untuk membantu usaha/ekonomi masyarakat.
3. Pada indikator akuntabilitas finansial, bahwa pelaporan keuangan dari hutan bakau belum dilakukan oleh internal dinas pariwisata, karena untuk

sementara ini masih dikelola DLHK dan murni dana dari swadaya masyarakat.

4. Adapun faktor pendukung dalam pengelolaan objek wisata hutan bakau di Kabupaten Mamuju yaitu :
  - a. Adanya dukungan, kerjasama dengan DLHK, dan beberapa pihak yang terlibat dalam proses pengembangan dan pengelolaan hutan bakau.
  - b. Adanya beberapa bantuan dari DLHK dan pihak-pihak yang ikut berpartisipasi dan mendukung proses pemeliharaan hutan bakau di Kabupaten Mamuju.
  - c. Sumbangan langsung dari Kementerian Perikanan dan Kelautan RI, seperti pembuatan dermaga atau jembatan penghubung dan bibit pohon bakau yang diserahkan kepada masyarakat sebagai modal awal pembangunan fasilitas objek wisata tersebut.
5. Faktor penghambat dalam pengelolaan objek wisata hutan bakau di Kabupaten Mamuju yaitu :
  - a. Terbatasnya dana serta belum ada anggaran khusus untuk pengembangan fasilitas objek wisata yang disebabkan belum masuk dalam program kerja tahunan Dinas Pariwisata.
  - b. Masih terbatasnya kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam mengelola dan mengembangkan potensi hutan bakau.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak terkait yaitu:

1. Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju diharapkan mampu bekerja sama dengan sektor privat dalam rangka mengelolakan mangrove, karena hutan mangrove memiliki banyak manfaat serta memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat dan perekonomian daerah.
2. Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju diharapkan mampu bekerja sama dengan masyarakat dalam pengelolaan (rehabilitasi) mangrove sebagai upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan nilai ekosistem mangrove, sehingga perlu dilestarikan.
3. Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju seharusnya transparan terkait dana pengelolaan hutan bakau dan harus dipublikasikan agar tidak terjadi kesalahpahaman oleh masyarakat terkait pengelolaan hutan bakau di Kabupaten Mamuju.
4. Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju harus lebih memperhatikan objek (destinasi) wisata yang ada di Kabupaten Mamuju, terutama hutan bakau sebagai pendapatan asli daerah (PAD) harusnya masuk dalam program kerja Dinas Pariwisata sehingga memiliki anggaran khusus untuk pengembangan objek wisata tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, Lukman Haris. 2007. *Hubungan Antara Kepuasan Kerja Dengan Komitmen Organisasi pada Pegawai Negeri Sipil*. Yogyakarta: Naskah Publikasi.
- Anonymous. 2015. *Profil Kesehatan Indonesia 2014*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia: Jakarta
- Arifiyadi, Teguh. 2008. *Konsep tentang akuntabilitas dan implementasinya di indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Choirul Saleh, 2012, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* Vol 13, No 1, *E-Government* Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Di Indonesia Antara Harapan Dan Kenyataan.
- Djalil, Rizal. 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah, Implementasi Pasca Reformasi*. Edisi 1. Jakarta: PT Semester Rakyat Merdeka.
- J. Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosda karya.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2013. *Akuntabilitas Birokrasi Publik : Sketsa pada masa transisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Omoregie Charles Osifo, 2014 *International Journal of Public Administration*, Volume 37, Issue 4.
- Putra, Deki 2013. *Pengarus Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (studi empiris pada SKPD Kota Padang)*. Skripsi, Universitas Negeri padang.
- Raba, Manggaukang. 2006. *Akuntabilitas, Konsep dan Implementasi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Rakhmat, Jalaludin. 2007. *Psikologi komunikasi*, bandung: Remaja Rosda karya.
- Rakhmat, Jalaludin. 2009. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung : PT Remaja Rosda karya.
- Simbolan, Anthon. 2006. *Akuntabilitas Birokrasi Publik, Edisi Revisi*, Yogyakarta: UGM.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

## UNDANG-UNDANG

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

